

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Kabupaten PINRANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Disusun Oleh :

HAMSINAR
10800112063

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. SultanAlauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720,
Fax.(0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. YasinLimpo No.36, Romangpolong-Gowa. ☎
(0411)841879, Fax. (0411) 8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)”**, yang disusun oleh **Hamsinar**, NIM: 10800112063, mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 07 April 2017, bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 16/08/2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syaharuddin, M.Si	(.....)
Penguji I	: Mustakim Muchlis., SE., M.Si., Ak	(.....)
Penguji II	: Dr. Alim Syariati., SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Jamaluddin M, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Puspita H. Anwar.,SE.M.Si.,Ak.,CA.CPAI	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamsinar
NIM : 10800112063
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 30 Juli 1993
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : BTN. Nusa Tamarunang, Blok K, No. 4/5
Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan
Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian
Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten
Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2017

Penyusun



HAMSINAR

10800112063

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Badduring Salatang dan ibunda Katang Mengge yang telah mempertaruhkan

seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
6. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Puspita Hardianti Anwar, SE., M.Si., Ak., CA. CPAI., sebagai dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
10. Bapak Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua keluarga tercinta, terkhusus saudara-saudaraku Kamarullah, SE, Sukmawati, A.ma, Ernawati, Nurhayati, Kamaruddin dan kakak iparku Fatmawati Basir, S.Pd, Harpendi, A.Ma, Asmar, dan Sudarto yang selama ini telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta sahabat-sahabatku Husni Alfiana, Muhammad Asri., ST, Sariana, S.pd, Sastiana, Dian Indira Murti, Andi Nurafiah, Gustina, Nurjannah, Ari Wahyuni, Andi Rasti Dwi Rahayu, Muriadi Akbar, Jasmin Usman, dan Tamrin yang memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan.
13. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi khususnya AK 3.4 angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dan atas kebersamaannya selama kuliah serta seluruh Akuntansi angkatan 2012 serta kakak-kakak senior angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 dan adek-adek junior angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016.
14. Teman-teman KKN Reguler Angk. 51 khususnya saudara-saudaraku Posko Desa Bungung Loe, Paitana, Kayu Loe Barat, Kayu Loe Timur, Parasangang

Beru, Langkura, Bontomatene, Jombe, Bulu Loe, Mangepong, Tanjonga. Kec. Turatea, Kab. Jennepono. Terima kasih atas persaudaraan yang singkat namun bermakna.

15. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terima kasih atas doa dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Samata-Gowa, April 2017

HAMSINAR
NIM. 10800112063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-33
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Hipotesis Penelitian	10
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	19
E. Kajian Pustaka	25
F. Tujuan Penelitian.....	31
G. Manfaat Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN TEORETIS	34-45
A. <i>Theory Agency</i>	34
B. Partisipasi Masyarakat.....	36
C. Akuntabilitas	37
D. Transparansi Kebijakan Publik	38
E. Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	39
F. Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	39
G. Kerangka Teoritis	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46-59
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik pengolahan Data Dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60-123
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	64
C. Hasil Uji Kualitas Data	80
D. Analisis Data	86
E. Pembahasan Penelitian.....	105

BAB V PENUTUP	124-126
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
C. Keterbatasan Penelitian	126
DAFTAR PUSTAKA	127-130
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :Rerangka Pikir	45
Gambar 4.1 :Struktur Organisasi.....	63
Gambar 4.2 :Hasil Uji Normalitas – Histogram.....	88
Gambar 4. 3:Hasil Uji Normalitas – <i>Normal Probability Plot</i>	89
Gambar 4.4 :Hasil Uji Heteroskedastisitas– <i>Scatterplot</i>	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Defenisi Operasional	23
Tabel 1.2 :Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 : Kriteria Penentuan Variabel Moderating	57
Tabel 4.1 :Tingkat Pengembalian Kuesioner	64
Tabel 4.2 :Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.3 :Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.4 :Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.5 :Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
Tabel 4.6 :Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4.7 :Ikhtisar Rentang Skala Variabel	69
Tabel 4.8 :Pernyataan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat.....	70
Tabel 4.9 :Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas	72
Tabel 4.10 :Pernyataan Responden Mengenai Transparansi Kebijakan Publik	73
Tabel 4.11 :Pernyataan Responden Mengenai Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	75
Tabel 4.12 :Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan	78
Tabel 4.13 :Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X ₁).....	81
Tabel 4.14 :Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X ₂)	81
Tabel 4.15 :Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X ₃)	82
Tabel 4.16 :Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian <i>Intern</i> (M)	82

Tabel 4.17 :Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	83
Tabel 4.18 :Hasil Uji Reliabilitas.....	85
Tabel 4.19 :Hasil Uji Normalitas - <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	87
Tabel 4.20 :Hasil Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.21 :Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) / Regresi 1	92
Tabel 4.22 :Hasil Uji F – Uji Simultan/ Regresi 1	93
Tabel 4.23 :Hasil Uji T Hitung/ Regresi 1	94
Tabel 4.24 : Kriteria Penentuan Variabel Moderating	98
Tabel 4.25 : Hasil Uji t (Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian <i>Intern</i>).....	99
Tabel 4.26 : Hasil Uji t (Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian <i>Intern</i>).....	99
Tabel 4.27 : Hasil Uji t (Transparansi Kebijakan Publik Dan Sistem Pengendalian <i>Intern</i>).....	100
Tabel 4.28 :Hasil Uji T Hitung/Regresi 2	100
Tabel 4.29 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) / Regresi 2.....	104
Tabel 4.30 : Hasil Uji F – Uji Simultan/ Regresi 2.....	105
Tabel 4.31 :Hasil Pengujian Hipotesis	106

ABSTRAK

Nama : Hamsinar

Nim : 10800112063

Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis regresi linear berganda dengan uji nilai selisih mutlak untuk hipotesis partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian *intern*.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* tidak memoderasi partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian *intern* mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian *intern* mampu memoderasi transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci :Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik, (Sukhemi, 2010).

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab, Nurcholis (2011:42) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Halim dan Kusufi (2013:1).

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun

daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, Mardiasmo (2006:3) dalam Untary (2015), pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi–aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal/8:27 (Kemenag RI, 2010:180) dan Q.S An-Nisa/4:58 (Kemenag RI, 2010:87) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (27)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...(58)

Kandungan kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa dengan menjalankan perintah yang telah disyariatkan dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan keburukan, terlebih jika mereka telah mengetahui bahwa amanah tersebut harus segera dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam ayat tersebut mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik tentang sistem pengelolaan keuangan dengan bentuk berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan berdasar pada ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di pusat maupun di daerah.

Menurut Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aziz (2015) menyebut bahwa hasil laporan keuangan pemerintah semester I tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II tahun 2014. Indikatornya adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil audit badan pemeriksa keuangan menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat masih lebih baik dibandingkan Daerah yang kurang baik. Pemerintah daerah diminta terus mendorong upaya perbaikan pelaporan keuangan. Aziz menyayangkan sikap pemerintah daerah

yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan atau tidak tepat waktu, www.merdeka.com dalam Situmorang (2016).

Badan pemeriksa keuangan menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada dewan perwakilan rakyat daerah setahun sekali atau diakhir masa jabatannya, (Permana, 2012). Namun dalam prakteknya, implementasi standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar, (Riana, 2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah

melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006). Lemahnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya sistem akuntansi pemerintah daerah. Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (Akbar, 2015).

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, (Mursyidi, 2010). Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayannya korupsi sistematis. Untuk mengikis hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian *intern* bagi pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah. Hasil penelitian Daniel & Yohanes (2013) menyebutkan dengan terciptanya penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya masing-masing, termasuk Sulawesi Selatan (Makassar) yang telah membangun kotanya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki unit perwakilan dari BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusun kebijakan yang terkait, di Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Takalar, Jennepono, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Selayar, palopo, Luwu, dan Tanah Toraja. Pembangunan diwilayah masing-masing telah dilakukan termasuk kabupaten Pinrang.

Semua program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pinrang semata-mata dilakukan untuk membangun daerah kabupaten Pinrang sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran

pendapatan dan belanja daerah di setiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pinrang belum memahami aspirasi yang ada dalam masyarakat dan belum menunjukkan adanya transparansi terhadap masyarakat ditandai dengan adanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah diterima selama 4 tahun berturut-turut. Pemerintah tidak mentransparansikan bagaimana laporan keuangan tersebut, hanya opini WTP yang ditransparansikan padahal masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan di Kabupaten Pinrang, Sumbernews (2015). Berdasarkan fenomena diatas, maka dilakukan penelitian mengenai

“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian *Intern* sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
6. Apakah sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
7. Apakah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran, Utami dan Efrizal (2013).

Selain masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hamid (2007) dalam Kusuma (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas, (Yahya, 2011).

Permana (2012) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, (Mustafa, 2013). Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah, (Munawir, 2011).

Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No.28 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, azas keterbukaan (*transparancy*) dalam penyelenggaran pemerintah daerah adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan. Tingkat kepercayaan akan melahirkan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program-programnya (Kusuma, 2012).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian *Intern* sebagai Variabel Moderasi

Masyarakat dapat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Maka secara harfiah partisipasi masyarakat dapat kita artikan sebagai peran serta sejumlah manusia dalam berbagai kegiatan. Ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran, Dobell dan Ulrich, (2002) dalam Utami dan Efrizal (2013).

Partisipasi masyarakat dalam penelitian Pramita dan Lilik (2010), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya, (Sofi, 2015).

Sistem pengendalian *intern* merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan Sistem Pengendalian *Intern* yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik, (Sukmaningrum, 2012). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sistem Pengendalian Intern Memperkuat Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian *Intern* sebagai Variabel Moderasi

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Akuntabilitas publik akan tercapai

jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif dan mewujudkan *good governance*, (Kurniawan, 2012).

Selain akuntabilitas, penerapan sistem pengendalian *intern* merupakan kunci dalam mewujudkan *good governance*. Hal tersebut perlu diperhatikan karena sesuai dengan amanah pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian *intern* pemerintah, dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian *intern* pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian *intern* pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian *intern* pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang, (Kartika, 2013). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Sistem Pengendalian Intern Memperkuat Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Dengan Sistem Pengendalian *Intern* sebagai Variabel Moderasi

Transparansi kebijakan publik, dalam penelitian Utami dan Efrizal (2013), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Penelitian lain tentang transparansi dilakukan oleh Kusuma (2012) penelitian penggunaan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Transparansi anggaran merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Sukoharjo, (Rahmawati, 2013). Partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah, namun kenyataan dilapangan masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD) dan transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi, (Kusuma, 2012).

Peran Sistem Pengendalian *Intern* adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pada tahun 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian *intern* baru ditetapkan pada tahun 2010 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian *intern* (SPI). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

7. Pengaruh Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

Partisipasi masyarakat dalam penelitian Pramita dan Lilik (2010), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta

membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya, (Sofi, 2015).

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi, (Kusuma, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun komponen sistem pengendalian *intern* pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan. Agar sistem pengendalian *intern* berjalan dengan maksimal, maka diperlukan kesadaran dari semua pihak baik pimpinan maupun bawahan untuk melaksanakannya sehingga akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula.

H7 : Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan. Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2011:61). Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Variabel terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:61). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

b. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), (Sugiyono, 2011:61). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik.

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bahwa setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah Loina (2003) dalam Utami dan Sofyan (2013). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

3) Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga dapat diartikan sebagai

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, Mardiasmo (2002) dalam Utami dan Sofyan (2013).

Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, (Sugiyono, 2011: 62). Variabel moderasi merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderasi. Oleh karena itu, variabel moderasi dinamakan pula dengan variabel *contingency*.

Sistem Pengendalian *Intern* merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan

kelengkapan informasi. Sistem Pengendalian *Intern* dalam penelitian ini diproksikan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1	2	3	4
Variabel Bebas			
Partisipasi masyarakat (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan agar Pemerintah daerah memperhatikan kepentingan masyarakat desa 2. Memberikan masukan agar APBD disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel 	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Jainuri dan Salahudin (2013)
Akuntabilitas (X_2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Rachmawaty (2014)
Transparansi kebijakan publik (X_3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Transparansi Proses 3. Transparansi Program 4. Transparansi Kebijakan 	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Rachmawaty (2014)

Variabel Moderasi			
Sistem pengendalian <i>intern</i> (M)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Drama (2014)
Variabel Terikat			
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Sukmaningrum (2012)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan antar variabel yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. Penelitian ini berusaha menganalisa pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi. Analisis faktor-faktor mencoba mengkaji hubungan internal dari sejumlah variabel-variabel. Variabel-variabel yang erat hubungannya akan bergabung membentuk sebuah faktor dimana setiap faktor yang terbentuk menggambarkan ciri dari variabel pembentuknya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pinrang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Pinrang.

D. Kajian Pustaka

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang diajukan acuan adalah terkait dengan masalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi. Penelitian pertama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dikemukakan oleh Madjham, dkk (2013) pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gorontalo utara. Menjelaskan bahwa semakin baik sistem pengendalian *intern* pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Sistem pengendalian *intern* pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian *intern* pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan *reliable*.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jainuri dan Salahudin (2013) model partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Di Kota Malang. Menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD telah disinggung sebelumnya, namun dalam konteks ini penulis ingin mengulas kembali bagaimana saluran partisipasi masyarakat dalam mengintervensi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Aswadi (2014) pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kabupaten Pinrang. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rachmawaty (2014) pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dilaksanakannya pertanggungjawaban tersebut maka akan yakin dengan kinerja tersebut, maka akan yakin dengan kinerja pemerintah serta laporan keuangan tersebut sudah dapat dikatakan berkualitas dengan

menjalankan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta laporan keuangan yang transparan merupakan harapan bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Dengan dijalankannya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berarti pemerintah daerah tersebut telah melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan laporan keuangan tersebut disampaikan secara terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa timur.

Drama (2014) pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. dengan demikian, jika sistem pengendalian intern pada SKPD Pemda Kota Solok baik dalam artian unsur-unsur dari SPI (lingkungan penendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian *intern*), dijalankan dengan maksimal, maka akan tercipta kualitas informasi keuangan yang baik pula. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian *intern* yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kurniasih (2014) pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem pengendalian internal pemerintahan telah menjalankan unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dengan baik sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang handal, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan baik artinya sistem pengendalian internal pemerintahan dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fikri, dkk (2015) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel *moderating*. System pengendalian *intern* merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan sistem pengendalian *intern* yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Sistem pengendalian *intern* yang baik tentunya tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber daya

aparatur yang kompeten, fungsi audit internal yang baik serta penerapan standar akuntansi didalam penyelenggaraan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Madjham, dkk (2013)	Pengaruh sistem pengendalian <i>intern</i> terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Sistem pengendalian <i>intern</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
2.	Jainuri dan Salahudin (2013)	Model partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kota Malang	Terbentuknya keberanian masyarakat (meskipun masih sangat terbatas) untuk melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah kota Malang.
3.	Aswadi (2014)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Pinrang	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan.
4.	Rachmawaty (2014)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
5.	Drama (2014)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan	Sistem pengendalian <i>intern</i> berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

		keuangan dengan sistem pengendalian <i>intern</i> sebagai variabel intervening	
6.	Kurniasih (2014)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung
7.	Fikri, dkk (2015)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian <i>intern</i> sebagai variabel <i>moderating</i>	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui sistem pengendalian *intern* dalam memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui sistem pengendalian *intern* dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui sistem pengendalian *intern* dalam memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang dan memperkuat teori yang dikemukakan sebelumnya oleh para ahli akuntansi khususnya mengenai Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi. Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola *agent* (pemerintah) dan *prinsipal* (publik/Masyarakat). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

- 2) Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak–pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi.
 - c. Bagi para akademisi, diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik dan dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.
 - d. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah agar lebih memperhatikan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pinrang dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Corporate Government*).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *prinsipal* dan *agent*. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *prinsipal* dan *agent*. *Prinsipal* mengontrak *agent* untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada *agent* sedangkan *agent* berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, Jensen dan Meckling (1976).

Haryanto dkk (2007) dalam Faristina (2011) mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/*agent* mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011).

Hubungan rakyat sebagai *prinsipal* dan kepala daerah sebagai *agent* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pemerintah daerah juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku *agent* terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku *prinsipal* adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah tentang keberhasilan berbagai program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi

anggaran pendapatan belanja serta opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh pemerintah daerah.

A. Partisipasi Masyarakat

Dobell dan Ulrich (2002) dalam Utami dan Efrizal (2013) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Hidayat (2015) kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerah yang kita tempati. Di samping itu juga sebagai warga negara yang aktif kita harus selalu tanggap dengan segala kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan agar:

1. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah di daerah sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
3. Pemerintah di daerah selalu berpihak kepada kepentingan umum (rakyat) bukan kepentingan partai ataupun kepentingan pribadi.

Sederet peraturan pemerintah daerah menginstruksikan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Hal ini dikenal dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar

penentuan arah kebijakan umum anggaran (KUA) sesuai dengan aspirasi murni atau kebutuhan riil masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik belaka.

B. Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik oleh masyarakat kepada pemerintah mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan kepada pemerintah pusat dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut Halim (2007) dalam Kusuma (2012).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan

keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen.

C. Transparansi Kebijakan Publik

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good corporate governance*. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Mustofa, dkk (2012) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik, (Sukhemi, 2011).

D. Sistem Pengendalian *Intern* (SPI)

Sistem pengendalian *intern* merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pengertian sistem pengendalian *intern* adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (Mahmudi, 2010:20)

Sistem pengendalian *intern* (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu, (Monica, 2011). Laporan keuangan merupakan suatu

pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain, Nordiawan, dkk (2012). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik, Kusuma (2012).

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengetian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa

laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*).

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - 4) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

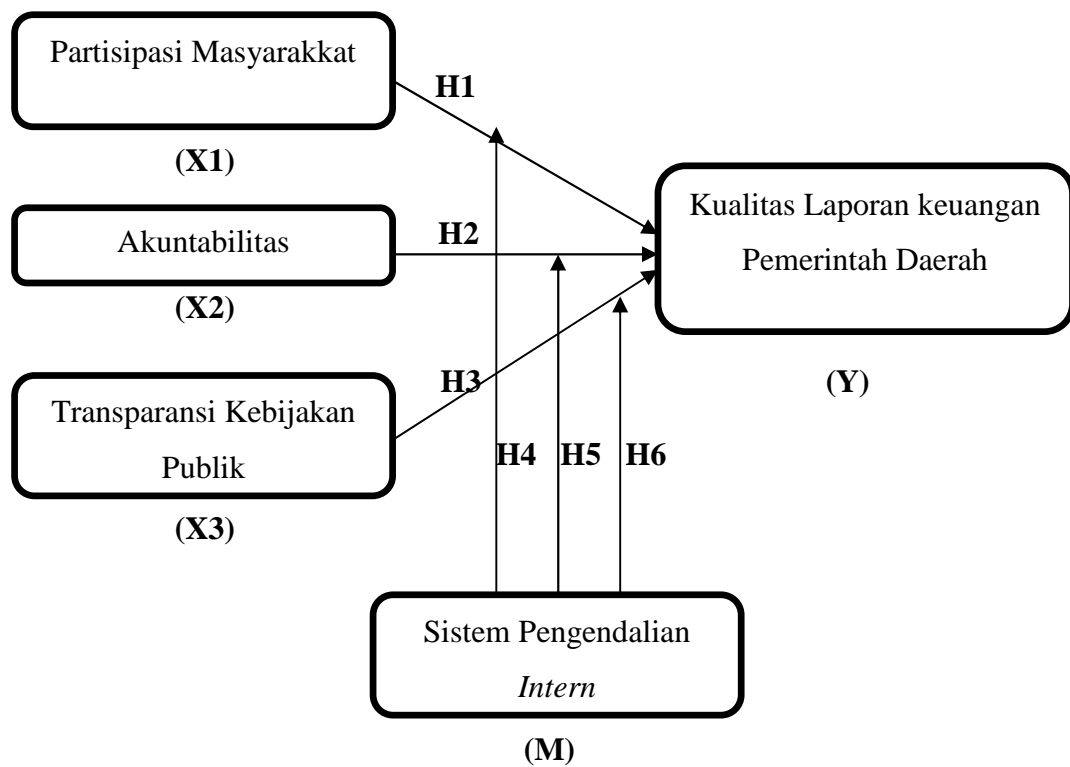
Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi, Daniel dan Yohanes (2013).

F. Kerangka Teoritis

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Untuk lebih

jelasnya disajikan kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masih perlu dianalisis. jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

2. Lokasi Penelitian

Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Waktu penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian direncanakan selama kurang lebih satu bulan, di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Pinrang. Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212.

B. Pendekatan Penelitians

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian korelasional (*Correlational Research*) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih yaitu penelitian studi kasus dan lapangan. Penelitian

ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta intraksinya dengan lingkungan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:117). Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, Indriantoro dan Supomo (2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pinrang.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2011:11). Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto (2010), apabila populasi kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi (sensus), artinya keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian (*total sampling*).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari

seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Pinrang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD pemerintah kabupaten Pinrang untuk kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis.

2. Kuesioner

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Sugiyono (2012:137), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel pengaruh partisipasi masyarakat (X1), akuntabilitas (X2), transparansi kebijakan publik (X3) dan Sistem Pengendalian *Intern* sebagai variabel moderasi (M) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang () pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut Riduwan (2012:2) kelebihan dari model tertutup adalah responden mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam pemberian kode dan responden tidak perlu menulis lebih banyak. Penelitian ini menggunakan skala *likert* satu sampai lima.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala *likert*, variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing – masing indikator di atas baik variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawaban diberikan skor sebagai berikut :

1. Sangat Setuju (SS) = skor 5
2. Setuju (S) = skor 4
3. Ragu-ragu (R) = skor 3

4. Tidak Setuju (TS) = skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1

F. Teknik pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis data deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh dinas pemerintah kabupaten Pinrang berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data. Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum untuk memperoleh deskriptif variabel dan nilai rata-rata dari frekuensi serta kategori pernyataan untuk deskriptif *item* pernyataan.

Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif tergantung pada tipe skala *construct* yang digunakan dalam penelitian. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin. Menurut Sugiyono (2011:134) Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{X_n - X_1}{K}$$

Keterangan : C= Perkiraan besarnya kelas

K= Banyaknya kelas

X_n = Nilai observasi terbesar

X_1 = Nilai observasi terkecil

2. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu keosener atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

a. Uji Validitas

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan

dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya.

Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *repeated measure* (pengukuran ulang) dan *one shot* (pengukuran sekali saja). Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar pernyataan lain. Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*, Reliabilitas suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* yang diperoleh $>0,60$.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Cara lain adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah:

- 1) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik *Scattter Plot* dengan ketentuan:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sample, berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikansi siltultan, uji siginfikansi Parameter Individual (t statistik) R square.

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel depanden dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 4.

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah

..... : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : Partisipasi Masyarakat

X_2 : Akuntabilitas

X_3 : Transparansi Kebijakan Publik

e : Standar *error*

b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Ghozali, (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 , X_2 dan X_3 dan berpengaruh terhadap Y . Misalkan jika skor tinggi (skor rendah) untuk variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik berasosiasi dengan skor rendah perlindungan hukum (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berasosiasi dengan skor tinggi dari sistem pengendalian *intern* (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M + \beta_5 |X_1 - M| + \beta_6 |X_2 - M| + \beta_7 |X_3 - M| + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah

X_1 : Partisipasi Masyarakat

X_2 : Akuntabilitas

X_3 : Transparansi Kebijakan Publik

M : Sistem Pengendalian *Intern*

X_i : Merupakan nilai standardized skor $[(X_i - \bar{X}_i) /$

$$X_i] = Zscore$$

$|X_1 - M|$: Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai

absolut perbedaan antara X1 dan M

$|X2 - M|$: Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai

absolut perbedaan antara X2 dan M

$|X3 - M|$: Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai

absolut perbedaan antara X3 dan M

..... : Konstanta

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7..... : Koefisien regresi

e : Standar *error*

Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2013).

Tabel 3.1
Kriteria Penentuan Variabel Moderating

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure</i> Moderasi	b_2 Tidak Signifikan b_3 Signifikan
2.	<i>Quasi</i> Moderasi	b_2 Signifikan b_3 Signifikan
3.	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b_2 Tidak Signifikan b_3 Tidak Signifikan
4.	Prediktor	b_2 Signifikan b_3 Tidak Signifikan

Keterangan:

b_2 : Variabel *book tax differences*

b3: Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (arus kas operasi, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan) dengan variabel *book tax differences*

Perhitungan dengan SPSS 21 akan diperoleh keterangan atau hasil tentang koefisien determinasi (R^2), Uji F, Uji t untuk menjawab perumusan masalah penelitian. berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni :

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika *Adjusted R2* bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika Koefisien determinasi mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b) Jika Koefisien determinasi mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan uji statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.

3) Uji Signifikansi Hitung T (Uji Parsial)

Untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $<$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

SEKRETARIS DPRD

Drs.H.ACHMAD SIDE,MSi
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip ; 19580706 198603 1 030
Tanggal ;01 Des 2015

KEPALA BAGIAN UMUM
H.SAKKA MAJENG,S.Sos,MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19621009 198703 1 012
Tanggal ; 6 Pebruari 2012

KABAG PERSIDANGAN
SYAMSUDDIN, SE, MSi
Pangkat ; Pembina TK.I
Nip : 19591231 198812 1 006
Tanggal ; 13 September 2012

KABAG KEUANGAN
ABD. RAHIM SIBADU, SE, MSi
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19581231 19203 1 044
Tanggal ; 10 Desember 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM
A.LUQMAN L, SH,MH
Pangkat Pembina
Nip : 19680603 199803 1 008
Tanggal : 6 Pebruari 2012

Kasubag Kepegawaian
SUDIRMAN, S.Sos
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19610705 199103 1 010
Tanggal : 26 Pebruari 2009

Kasubag Persidangan & Risalah
AMIRUDDIN B
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19620809 198602 1 008
Tanggal : 7 Januari 2013

Sub Bagian Anggaran
HARTATY, S.Pi
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19711019 200312 2 002
Tanggal ; 6 Pebruari 2012

Sub Bagian Peraturan
Perundang-Perundangan
Hj. Faridah, SP
Pangkat : Penata Tk. I
Nip.197907042002122009

Kasubag Perlengkapan
ANDI IDRIAPATI,S.Sos
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19720512 199402 1 002
Tanggal : 2014

Kasubag Penerima Risalah
Syahrir Madjid,SE
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19591231198503132
Tanggal ; 26 Pebruari 2009

Sub Bagian Perbendaharaan
Dra. Hj.Marliana
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 196812311993032040
Tanggal : 25 Mei 2007

Sub Bagian Dokumentasi & Informasi
Nurdin Nurung
Pangkat : Penata TK.I
Nip. 195907071983031026
Tanggal : 26 Pebruari 2009

Kasubag Humas
DHANNY ARIA WAHYUDI,S.Sos,M.si
Pangkat : Penata
Nip : 19780902 200604 1 014
Tanggal : 13 September 2012

Kasubag Protokol
Hj. S a n i a h, S.Sos
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 196210141989032003
Tanggal ; 26 Pebruari 2009

Sub Bagian Verifikasi
Hj. Nurdiana Mare, S.Sos
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19681231 199402 2 043
Tanggal : 26 juli 2009

Sub Bagian Perpustakaan
Hj.SALMIAH
Pangkat : Penata TK.I
Nip : 19611231198502 2 008
Tanggal 7 Januari 2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah kabupaten di provinsi sulawesi selatan, indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dan berpenduduk sebanyak ±347.684 jiwa. Asal muasal Pemberian nama Pinrang ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa", hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang, masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan to barani pole' Kassa disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa” yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa, maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai Pinrayang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi Pinrang.

Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari *onder ofdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Pare-Pare. yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja Yaitu Kassa, Batulappa,

Sawitto, Dan Suppa Yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba Kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan.

Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya ke empat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor *onder afdelingeen* (kantor residen). Selanjutnya *onder afdeling* Pinrang ini, pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. Alamat kantor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang yaitu Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Menjadikan dewan rakyat daerah kabupaten pinrang sebagai lembaga yang partisipatif, responsif dan akuntabel dalam mengarus utamakan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum masyarakat.

b) Misi

Untuk mencapai visi maka dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang mengembangkan misi sebagai berikut:

- 1) Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di kabupaten Pinrang.

- 2) Mendorong penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum masyarakat yang partisipatif, aspiratif, akuntabel dan bertanggung jawab.
- 3) Mengarustamakan prinsip partisipatif dalam setiap tahapan dan proses perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan publik.
- 4) Menekankan percepatan anggaran daerah yang berorientasi dan berpihak kepada rakyat. (*pro poor budgeting*).
- 5) Mengintensipkan penyelenggaraan pengawasan dan menjadi mediator maupun fasilitator dalam upaya penyelesaian masalah, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan dan implementasi peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan pemerintah daerah.
- 6) Menata dan merevitalisasi lembaga DPRD melalui peningkatan kapasitas lembaga dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan : Peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 17 tahun 2008.

Tentang : Organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat

DPRD kabupaten Pinrang

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Seluruh satuan kerja perangkat daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang. Peneliti menyebar 100 kusioner, tetapi hanya 70 kusioner yang dapat dijadikan data penelitian. Tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 70% dikarenakan 10 kusioner tidak kembali dan 20 kusioner tidak terisi sehingga tidak dapat dijadikan data penelitian.

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kusioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kusioner yang di sebar	100	100%
Kusioner yang tidak dikembalikan	10	10%
Kusioner yang tidak terisi	20	20%
Kusioner yang dapat diolah	70	70%

Sumber: Data primer 2017, diolah

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 50 responden (71,4%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 responden (28,6%).

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	50	71,4%
Perempuan	20	28,6%
Total	70	100%

Sumber: Data primer 2017, diolah

b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 20-35 tahun yaitu sebanyak 17 responden (24,3%), dilanjutkan dengan umur antara 36-45 tahun sebanyak 25 responden (35,7 %), berumur antara 46-55 tahun sebanyak 23 responden (32,9 %), serta berumur lebih dari 55 tahun sebanyak 5 responden (7,1%). Sedangkan, responden yang berumur kurang dari 20 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<20	-	-
20-35	17	24,3%
36-45	25	35,7 %
46-55	23	32,9 %
>55	5	7,1%
Total	70	100 %

Sumber: Data primer 2017, diolah

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa dari 70 responden menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA yaitu 5 responden (7,1%), pendidikan D-3

sebanyak 10 responden (14,3%), pendidikan S-1 sebanyak 45 responden (64,3%), S-2 yaitu sebanyak 6 responden (8,6%), dan S-3 sebanyak 4 responden (5,7%)

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	5	7,1%
D-3	10	14,3 %
S-1	45	64,3%
S-2	6	8,6%
S-3	4	5,7 %
Total	70	100 %

Sumber: Data primer 2017, diolah

d. Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah bekerja selama 2-10 tahun sebanyak 25 responden (35,7%), bekerja selama 11-20 tahun sebanyak 19 responden (27,1%), dan bekerja selama 20 tahun keatas sebanyak 26 responden (37,2%). Sedangkan, responden dengan masa kerja kurang dari 2 tahun tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena tidak memenuhi syarat kriteria sampel sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<2	-	-
2-10	25	35,7%
11-20	19	27,1%
>20	26	37,2%
Total	70	100 %

Sumber: Data primer 2017, diolah

2. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif variabel dari 70 responden Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi Mum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Masyarakat	70	31,00	40,00	35,71	2,62
Akuntabilitas	70	38,00	54,00	44,80	5,55
Transparansi Kebijakan Publik	70	26,00	35,00	29,81	2,25
Sisten Pengendalian Internal	70	87,00	129,00	109,18	17,06
Kualitas Laporan Keuangan	70	65,00	97,00	83,48	9,39
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Output SPSS 21

Tabel 4.6 statistik deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa range yang digunakan adalah skala likert 1-5 dimana nilai angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai rata-rata 35,71. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 31,00 dan nilai maximum adalah 40,00. Sedangkan nilai

standar deviasi adalah 2,62, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel akuntabilitas mempunyai nilai rata-rata 44,80. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 38,00 dan nilai maximum adalah 54,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 5,55, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel transparansi kebijakan publik mempunyai nilai rata-rata 29,81. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 26,00 dan nilai maximum adalah 35,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,25, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel sistem pengendalian *intern* mempunyai nilai rata-rata 109,18. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian *intern* yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 87,00 dan nilai maximum adalah 129,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 17,06, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata 83,48. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 65,00 dan nilai maximum adalah 97,00. Sedangkan nilai

standar deviasi adalah 9,39, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Sistem pengendalian *intern* yakni 109,18, sedangkan yang terendah adalah variabel Transparansi kebijakan publik yaitu 29,81. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel sistem pengendalian *intern* yaitu 17,06 dan yang terendah adalah variabel transparansi kebijakan publik yaitu 2,25.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik, sistem pengendalian *intern* dan kualitas laporan keuangan. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu :

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8, dengan demikian rentang skala 0,8 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Ikhtisar Rentang Skala Variabel

Rentang	Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas	Transparansi Kebijakan Publik	Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	Kualitass Laporan Keuangan
1 X < 1,80	SR	SR	SR	SR	SR
1,80 X < 2,60	R	R	R	R	R
2,61 X < 3,40	S	S	S	S	S
3,41 X < 4,20	T	T	T	T	T
4,21 X < 5	ST	ST	ST	ST	ST

Keterangan : SR : Sangat Rendah

R : Rendah

S : Sedang

T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

1) Analisis Deskriptif variabel Partisipasi Masyarakat (X_1)

Analisa deskripsi terhadap variabel partisipasi masyarakat yang terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai partisipasi masyarakat, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pernyataan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket.
Bobot		1	2	3	4	5			
PM_1	F		1	25	44		70	3,61	T
	Skor		2	75	176		253		
	%		1,4	35,7	62,9		100		
PM_2	F		1	24	45		70	3,62	T
	Skor		2	72	180		254		
	%		1,4	34,3	64,3		100		
PM_3	F		8	17	45		70	3,52	T
	Skor		16	51	180		247		
	%		11,4	24,3	64,3		100		
PM_4	F		2	25	43		70	3,58	T
	Skor		4	75	172		251		
	%		2,9	35,7	61,4		100		
PM_5	F		2	33	35		70	3,47	T
	Skor		4	99	140		243		
	%		2,9	47,1	50		100		
PM_6	F			26	44		70	3,62	T
	Skor			78	176		254		

	%			37,1	62,9		100		
PM_7	F		4	20	46		70	3,57	T
	Skor		6	60	184		250		
	%		5,7	28,6	65,7		100		
PM_8	F		1	27	41	1	70	3,6	T
	Skor		2	81	164	5	252		
	%		1,4	38,6	58,6	1,4	100		
PM_9	F		1	33	36		70	3,5	T
	Skor		2	99	144		245		
	%		1,4	47,1	51,4		100		
PM_10	F			31	39		70	3,55	T
	Skor			93	156		249		
	%			44,3	55,7		100		
Rata-rata Keseluruhan								35,64	T

Sumber: Data primer 2017, diolah

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada partisipasi masyarakat (X_1) berada pada daerah tinggi dengan skor 35,64. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap partisipasi masyarakat pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang. Pada indikator pertama untuk partisipasi masyarakat, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah, menganggap bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,63.

2) Analisis Deskriptif variabel Akuntabilitas (X_2)

Analisa deskripsi terhadap variabel akuntabilitas yang terdiri dari 13 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai akuntabilitas, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket.
Bobot		1	2	3	4	5			
AK_1	F		8	21	24	17	70	3,71	T
	Skor		16	63	96	85	260		
	%		11,4	30	34,3	24,3	100		
AK_2	F		10	18	37	5	70	3,52	T
	Skor		20	54	148	25	247		
	%		14,3	25,7	52,9	7,1	100		
AK_3	F		9	35	22	4	70	3,3	S
	Skor		18	105	88	20	231		
	%		12,9	50	31,4	5,7	100		
AK_4	F		2	27	31	10	70	3,98	T
	Skor		4	81	124	50	279		
	%		2,9	38,6	44,3	14,3	100		
AK_5	F		2	37	31		70	3,41	T
	Skor		4	111	124		239		
	%		2,9	52,8	44,3		100		
AK_6	F		5	43	18	4	70	3,3	S
	Skor		10	129	72	20	231		
	%		7,1	61,4	25,7	5,7	100		
AK_7	F		33	19	11	7	70	2,88	S
	Skor		66	57	44	35	202		
	%		47,1	27,1	15,7	10	100		
AK_8	F		19	10	34	7	70	3,41	T
	Skor		38	30	136	35	239		
	%		27,1	14,3	48,6	10	100		
AK_9	F		7	31	28	3	70	2,91	S
	Skor		14	62	112	15	204		
	%		10	44,3	40	4,3	100		
AK_10	F		5	30	35		70	3,42	T
	Skor		10	90	140		240		
	%		7,1	42,9	50		100		
AK_11	F		1	34	29	6	70	3,57	S
	Skor		2	102	116	30	250		
	%		1,4	48,6	41,4	8,6	100		
AK_12	F		1	29	33	7	70	3,65	T

	Skor		2	87	132	35	256		
	%		1,4	41,4	47,1	10	100		
AK_13	F		1	35	30	4	70	3,52	T
	Skor		2	105	120	20	247		
	%		1,4	50	42,9	5,7	100		
Rata-rata Keseluruhan								44,58	ST

Sumber: Data primer 2017, diolah

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada akuntabilitas (X_2) berada pada daerah tinggi dengan skor 44,58. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap akuntabilitas pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang. Pada variabel akuntabilitas, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah, menganggap bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,98.

3) Analisis Deskriptif variabel Transparansi Kebijakan Publik (X_3)

Analisa deskripsi terhadap variabel Transparansi Kebijakan Publik yang terdiri dari 8 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai transparansi kebijakan publik, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pernyataan Responden Mengenai Transparansi Kebijakan Publik

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket.
Bobot		1	2	3	4	5			
TKP_1	F			24	43	3	70	3,7	T
	Skor			72	172	15	259		

	%			34,3	61,4	4,3	100		
TKP_2	F		1	19	47	3	70	3,74	T
	Skor		2	57	188	15	262		
	%		1,4	27,1	67,1	4,3	100		
TKP_3	F			20	47	3	70	3,75	T
	Skor			60	188	15	263		
	%			28,6	67,1	4,3	100		
TKP_4	F			24	41	5	70	3,72	T
	Skor			72	164	25	261		
	%			34,3	58,6	7,1	100		
TKP_5	F			23	45	2	70	3,7	T
	Skor			69	180	10	259		
	%			32,8	64,3	2,9	100		
TKP_6	F			20	47	3	70	3,75	T
	Skor			60	188	15	263		
	%			28,6	67,1	4,3	100		
TKP_7	F			25	44	1	70	3,65	T
	Skor			75	176	5	256		
	%			35,7	62,9	1,4	100		
TKP_8	F			21	44	5	70	3,77	T
	Skor			63	176	25	264		
	%			30	62,9	7,1	100		
Rata-rata Keseluruhan								29,78	S

Sumber: Data primer 2017, diolah

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada transparansi kebijakan publik (X_3) berada pada daerah sedang dengan skor 29,78. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap transparansi kebijakan publik pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang. Pada variabel transparansi kebijakan publik, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah, menganggap bahwa transparansi kebijakan publik dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,77.

4) Analisis Deskriptif variabel Sistem Pengendalian *Intern* (M)

Analisa deskripsi terhadap variabel Sistem Pengendalian *Intern* yang terdiri dari 29 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Sistem Pengendalian *Intern*, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pernyataan Responden Mengenai Sistem Pengendalian *Intern*

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket.
Bobot		1	2	3	4	5			
SPI_1	F			14	52	4	70	3,85	T
	Skor			42	208	20	270		
	%			20	74,3	5,7	100		
SPI_2	F	8	2	4	53	3	70	3,58	T
	Skor	8	4	12	212	15	251		
	%	11,4	2,9	5,7	75,7	4,3	100		
SPI_3	F	9	3	15	10	33	70	3,78	T
	Skor	9	6	45	40	165	265		
	%	12,9	4,3	21,4	14,3	47,1	100		
SPI_4	F		3	13	28	26	70	4,1	T
	Skor		6	39	112	130	287		
	%		4,3	18,6	40	37,1	100		
SPI_5	F		12	4	45	9	70	3,72	T
	Skor		24	12	180	45	261		
	%		17,1	5,7	64,3	12,9	100		
SPI_6	F	1	7	25	19	18	70	3,65	T
	Skor	1	14	75	76	90	256		
	%	1,4	10	35,7	27,5	25,7	100		
SPI_7	F	1		4	31	34	70	4,38	ST
	Skor	1		12	124	170	307		
	%	1,4		5,7	44,3	48,6	100		
SPI_8	F		2	3	50	15	70	4,11	T
	Skor		4	9	200	75	288		

	%		2,9	4,3	71,4	21,4	100		
SPI_9	F			13	57		70	3,81	T
	Skor			39	228		267		
	%			18,6	81,4		100		
SPI_10	F		9	17	11	33	70	3,97	T
	Skor		18	51	44	165	278		
	%		12,9	24,3	15,7	47,1	100		
SPI_11	F		9	20	20	21	70	3,75	T
	Skor		18	60	80	105	263		
	%		12,9	28,6	28,6	30	100		
SPI_12	F	16		4	28	22	70	3,57	T
	Skor	16		12	112	110	250		
	%	22,9		5,7	40	31,4	100		
SPI_13	F		16	7	14	33	70	3,91	T
	Skor		32	21	56	165	274		
	%		22,9	10	20	47,1	100		
SPI_14	F	8	16	28	18		70	2,8	S
	Skor	8	32	84	72		196		
	%	11,4	22,9	40	25,7		100		
SPI_15	F		13	40	17		70	3,05	T
	Skor		26	120	68		214		
	%		18,6	57,1	24,3		100		
SPI_16	F		19	30	68	4	70	3,08	S
	Skor		38	90	24,3	20	216		
	%		27,1	42,9	15	5,7	100		
SPI_17	F		31	11	60	13	70	3,14	S
	Skor		62	33	21,4	65	220		
	%		44,3	15,7		18,6	100		
SPI_18	F		1	14	33	22	70	4,08	T
	Skor		2	42	132	110	286		
	%		1,4	20	47,1	31,4	100		
SPI_19	F		2	12	33	23	70	4,1	T
	Skor		4	36	132	115	287		
	%		2,9	17,1	47,1	32,9	100		
SPI_20	F		13	6	42	9	70	3,67	T
	Skor		26	18	168	45	257		
	%		18,6	8,6	60	12,9	100		
SPI_21	F			25	38	7	70	3,74	T
	Skor			75	152	35	262		

	%			35,7	54,3	10	100		
SPI_22	F		11	15	16	28	70	3,81	T
	Skor		22	45	64	140	271		
	%		15,7	21,4	22,9	40	100		
SPI_23	F		19	5	14	32	70	3,84	T
	Skor		38	15	56	160	269		
	%		27,1	7,1	20	45,7	100		
SPI_24	F		1	24	24	21	70	3,92	T
	Skor		2	72	96	105	275		
	%		1,4	34,3	34,3	30	100		
SPI_25	F		11	17	42		70	3,44	T
	Skor		22	51	168		241		
	%		15,7	24,3	60		100		
SPI_26	F		11	15	44		70	3,47	T
	Skor		22	45	176		243		
	%		15,7	21,4	62,9		100		
SPI_27	F		2	33	35		70	3,47	T
	Skor		4	99	140		243		
	%		2,9	47,1	50		100		
SPI_28	F		6	29	35		70	3,41	T
	Skor		12	87	140		239		
	%		8,6	41,4	50		100		
SPI_29	F		13	57			70	2,81	S
	Skor		26	171			197		
	%		18,6	81,4			100		
Rata-rata Keseluruhan								102,44	ST

Sumber: Data primer 2017, diolah

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sistem pengendalian *intern* (M) berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 102,44. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sistem pengendalian *intern* pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang. Pada variabel sistem pengendalian *intern*, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah, menganggap bahwa sistem

pengendalian *intern* dalam pelaksanaanya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,38.

5) Analisis Deskriptif variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Analisa deskripsi terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang terdiri dari 22 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kualitas laporan keuangan, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

Jawaban Responden		STS	TS	R	S	SS	Total	Rata-rata	Ket.
Bobot		1	2	3	4	5			
KLK_1	F				28	42	70	4,6	ST
	Skor				112	210	322		
	%				40	60	100		
KLK_2	F			17	43	10	70	3,9	T
	Skor			51	172	50	273		
	%			24,3	61,4	14,3	100		
KLK_3	F			19	47	4	70	3,78	T
	Skor			57	188	20	265		
	%			27,1	67,1	5,7	100		
KLK_4	F		15	5	24	26	70	3,87	T
	Skor		30	51	96	130	271		
	%		21,4	7,1	34,3	37,1	100		
KLK_5	F		28	3	20	19	70	3,42	T
	Skor		56	9	80	95	240		
	%		40	4,3	28,6	27,1	100		
KLK_6	F		1	4	50	15	70	4,12	T
	Skor		2	12	200	75	289		
	%		1,4	5,7	71,4	21,4	100		
KLK_7	F		1	4	57	8	70	4,02	T
	Skor		2	12	228	40	282		

	%		1,4	5,7	81,4	11,4	100		
KLK_8	F		3	7	42	18	70	4,07	T
	Skor		6	21	168	90	285		
	%		4,3	10	60	25,7	100		
KLK_9	F		1	32	27	10	70	3,65	T
	Skor		2	96	108	50	256		
	%		1,4	45,7	38,6	14,3	100		
KLK_10	F			24	23	23	70	3,98	T
	Skor			72	92	115	279		
	%			34,3	32,9	32,9	100		
KLK_11	F		17	13	40		70	3,32	S
	Skor		34	39	160		233		
	%		24,3	18,6	57,1		100		
KLK_12	F		10	2	51	7	70	3,78	T
	Skor		20	6	204	35	265		
	%		14,3	2,9	72,9	10	100		
KLK_13	F			2	53	15	70	4,18	T
	Skor			6	212	75	293		
	%			2,9	75,7	21,4	100		
KLK_14	F			17	41	12	70	3,92	T
	Skor			51	164	60	275		
	%			24,3	58,6	17,1	100		
KLK_15	F	1	13	23	21	12	70	3,42	T
	Skor	1	26	69	84	60	240		
	%	1,4	18,6	32,9	30	17,1	100		
KLK_16	F		15	22	23	10	70	3,4	S
	Skor		30	66	92	50	238		
	%		21,4	31,4	32,9	14,3	100		
KLK_17	F	2	21	22	13	12	70	3,17	S
	Skor	2	42	66	52	60	222		
	%	2,9	30	31,4	18,6	17,1	100		
KLK_18	F			18	44	8	70	3,85	T
	Skor			54	176	40	270		
	%			25,7	62,9	11,4	100		
KLK_19	F		5	19	45	1	70	3,6	T
	Skor		10	57	180	5	252		
	%		7,1	27,1	64,3	1,4	100		
KLK_20	F		10	30	28	2	70	3,31	S
	Skor		20	90	112	10	232		

	%		14,3	42,9	40	2,9	100		
KLK_21	F			21	37	12	70	3,87	T
	Skor			63	148	60	271		
	%			30	52,9	17,1	100		
KLK_22	F			4	51	15	70	4,15	T
	Skor			12	204	75	291		
	%			5,7	72,9	21,4	100		
Rata-rata Keseluruhan								83,38	ST

Sumber: Data primer 2017, diolah

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kualitas laporan keuangan (Y) berada pada daerah sangat tinggi dengan skor 83,38. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kualitas laporan keuangan pada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang. Pada variabel kualitas laporan keuangan, responden yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah, menganggap bahwa kualitas laporan keuangan dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,6.

C. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai *r* hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari *r* tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Dalam

pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Berikut ini disajikan hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel partisipasi Masyarakat (X₁)

Instrumen Penelitian	r hitung	r table	Keterangan
AF_1	0,525	0,235	Valid
AF_2	0,478	0,235	Valid
AF_3	0,457	0,235	Valid
AF_4	0,368	0,235	Valid
AF_5	0,341	0,235	Valid
AF_6	0,495	0,235	Valid
AF_7	0,332	0,235	Valid
AF_8	0,373	0,235	Valid
AF_9	0,749	0,235	Valid
AF_10	0,698	0,235	Valid

Sumber: Data primer 2017, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel partisipasi masyarakat yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₂)

Instrumen Penelitian	r hitung	r table	Keterangan
AK_1	0,648	0,235	Valid
AK_2	0,725	0,235	Valid
AK_3	0,391	0,235	Valid
AK_4	0,417	0,235	Valid
AK_5	0,756	0,235	Valid
AK_6	0,300	0,235	Valid
AK_7	0,569	0,235	Valid
AK_8	0,858	0,235	Valid
AK_9	0,314	0,235	Valid

AK_10	0,466	0,235	Valid
AK_11	0,687	0,235	Valid
AK_12	0,458	0,235	Valid
AK_13	0,556	0,235	Valid

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Akuntabilitas yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X₃)

Instrumen Penelitian	r hitung	r table	Keterangan
TKP_1	0,541	0,235	Valid
TKP_2	0,527	0,235	Valid
TKP_3	0,453	0,235	Valid
TKP_4	0,618	0,235	Valid
TKP_5	0,466	0,235	Valid
TKP_6	0,527	0,235	Valid
TKP_7	0,412	0,235	Valid
TKP_8	0,61	0,235	Valid

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Transparansi Kebijakan Publik yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian *Intern* (M)

Instrumen Penelitian	r hitung	r table	Keterangan
SPI_1	0,390	0,235	Valid
SPI_2	0,496	0,235	Valid
SPI_3	0,911	0,235	Valid
SPI_4	0,798	0,235	Valid

SPI_5	0,284	0,235	Valid
SPI_6	0,711	0,235	Valid
SPI_7	0,258	0,235	Valid
SPI_8	0,344	0,235	Valid
SPI_9	0,495	0,235	Valid
SPI_10	0,939	0,235	Valid
SPI_11	0,875	0,235	Valid
SPI_12	0,737	0,235	Valid
SPI_13	0,842	0,235	Valid
SPI_14	0,798	0,235	Valid
SPI_15	0,571	0,235	Valid
SPI_16	0,293	0,235	Valid
SPI_17	0,509	0,235	Valid
SPI_18	0,415	0,235	Valid
SPI_19	0,321	0,235	Valid
SPI_20	0,638	0,235	Valid
SPI_21	0,830	0,235	Valid
SPI_22	0,919	0,235	Valid
SPI_23	0,812	0,235	Valid
SPI_24	0,682	0,235	Valid
SPI_25	0,854	0,235	Valid
SPI_26	0,847	0,235	Valid
SPI_27	0,838	0,235	Valid
SPI_28	0,749	0,235	Valid
SPI_29	0,476	0,235	Valid

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Sistem Pengendalian *Intern* yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Instrumen Penelitian	r hitung	r table	Keterangan
KLK_1	0,781	0,235	Valid
KLK_2	0,738	0,235	Valid

KLK_3	0,805	0,235	Valid
KLK_4	0,842	0,235	Valid
KLK_5	0,630	0,235	Valid
KLK_6	0,495	0,235	Valid
KLK_7	0,305	0,235	Valid
KLK_8	0,323	0,235	Valid
KLK_9	0,550	0,235	Valid
KLK_10	0,583	0,235	Valid
KLK_11	0,813	0,235	Valid
KLK_12	0,673	0,235	Valid
KLK_13	0,455	0,235	Valid
KLK_14	0,360	0,235	Valid
KLK_15	0,411	0,235	Valid
KLK_16	0,452	0,235	Valid
KLK_17	0,533	0,235	Valid
KLK_18	0,799	0,235	Valid
KLK_19	0,630	0,235	Valid
KLK_20	0,300	0,235	Valid
KLK_21	0,487	0,235	Valid
KLK_22	0,443	0,235	Valid

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Kualitas Laporan Keuangan yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan.

Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (), koefisien reliabilitas $> 0,60$.

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Ket.
Partisipasi Masyarakat	0,616	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,807	0,60	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0,613	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	0,948	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,887	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Sistem Pengendalian *Intern* dan Kualitas Laporan Keuangan yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas Interpretasinya ditunjukkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Tabel 4.19
 Hasil Uji Normalitas – *One Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	6,19539131
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,806
Asymp. Sig. (2-tailed)		,534

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

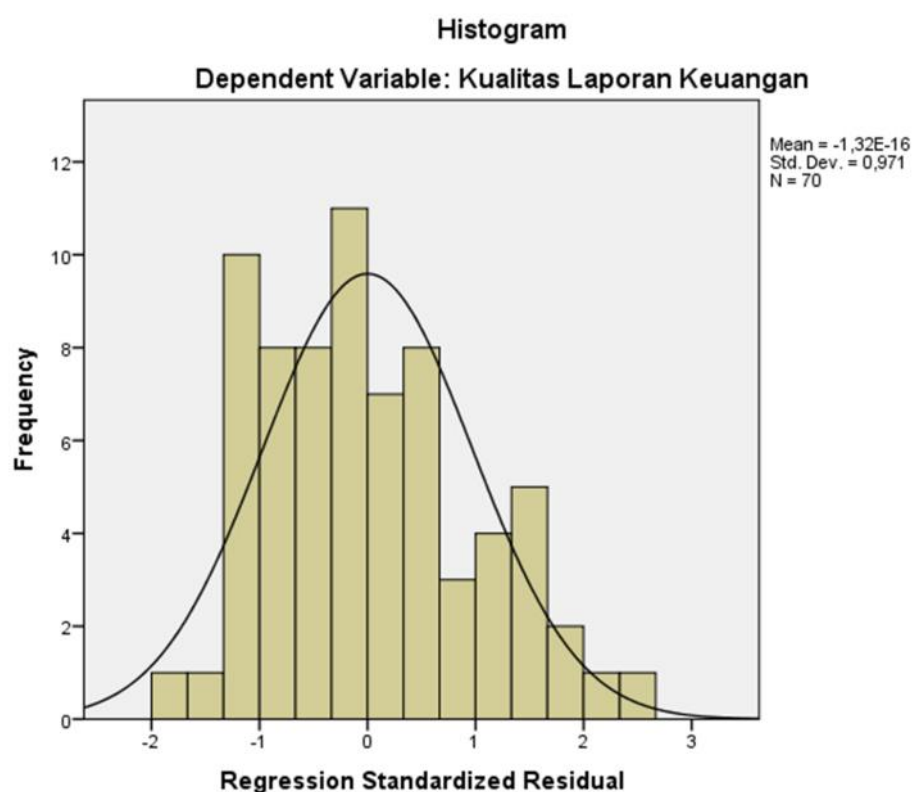
Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.19 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,534, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Selanjutnya salah satu faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram. berikut juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik

normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot residual juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan melihat histogram dari nilai-nilai residual data sampel yang berdistribusi normal ditandai dengan kurva yang simetris.

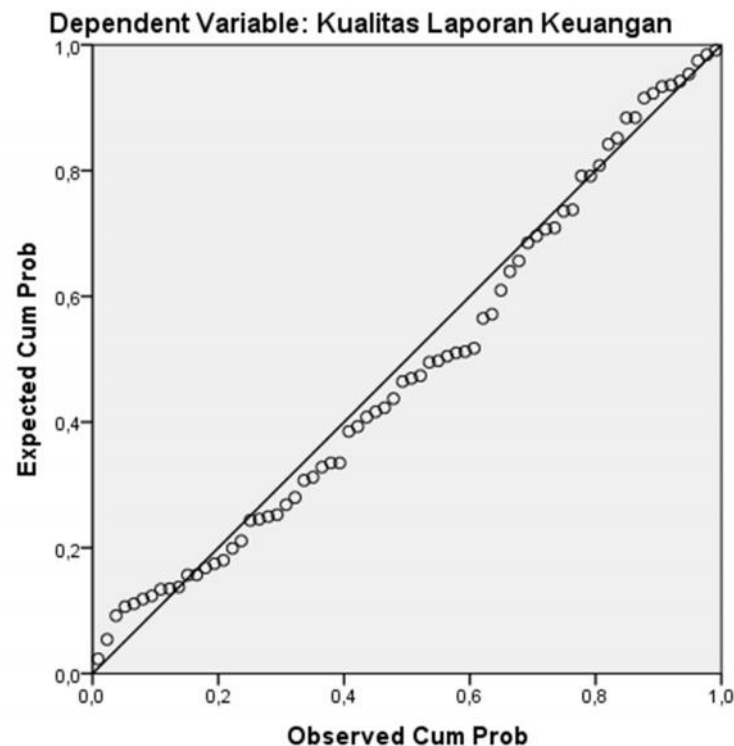
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas - Histogram



Sumber: Output SPSS 21

Pengujian normalitas melalui analisis grafik lainnya dilakukan dengan menganalisis grafik *Probability Plot Residual Standardized Residual*, yaitu dari nilai-nilai residual yang berdistribusi secara random dan terkumpul disekitar garis lurus yang melalui titik nol maka residual berdistribusi normal, seperti pada gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3
 Hasil Uji Normalitas – *Normal Probability Plot*
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output SPSS 21

Gambar 4.3 di atas menunjukkan adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara

untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Partisipasi Masyarakat	0,373	2,683
Akuntabilitas	0,871	1,148
Transparansi Kebijakan Publik	0,79	1,266
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	0,388	2,58

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

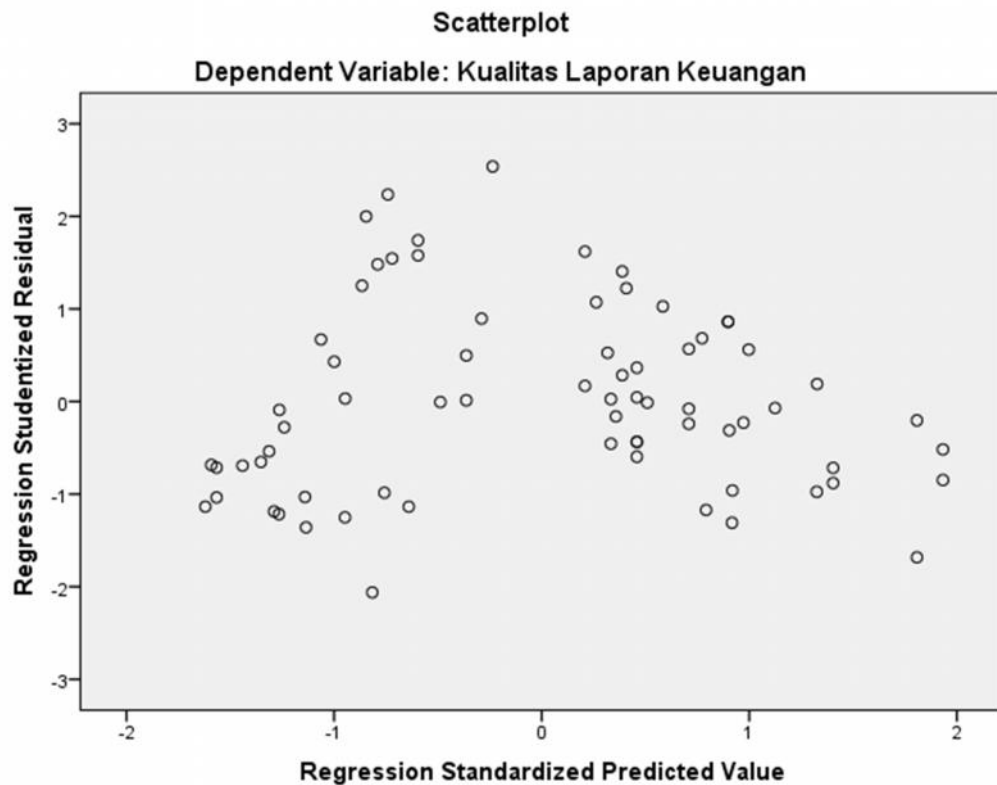
Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.20 diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independennya (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik).

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas – *Scatterplot*



Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan Gambar 4.12, grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan berdasarkan variabel independennya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik.

2. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern*) terhadap variabel dependen (Kualitas laporan keuangan), sedangkan untuk menguji hipotesis H_{1M} , H_{2M} dan H_{3M} dan menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H_1 , H_2 H_3

Pengujian hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan keuangan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,752 ^a	,565	,538	6,38317

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian *Intern*, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,752 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,80 - 1,0. Hal ini menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berpengaruh sangat kuat terhadap Kualitas laporan keuangan..

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,538, hal ini berarti bahwa 53,8% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern*. Sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.22
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3437,067	4	859,267	21,089	,000 ^b
	Residual	2648,418	65	40,745		
	Total	6085,486	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian *Intern*, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 721,089 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F hitung (721,089) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,13 ($df_1=3-1=2$ dan $df_2=70-3=67$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi

kebijakan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.23
Hasil Uji T Hitung – Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,342	14,760		1,649	,104
Partisipasi Masyarakat	1,253	,480	,350	2,610	,011
Akuntabilitas	,385	,148	,228	2,599	,012
Transparansi Kebijakan Publik	,883	,384	,212	2,301	,025

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 24,342 + 1,253X_1 + 0,385X_2 + 0,883X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Partisipasi Masyarakat

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Transparansi Kebijakan Publik

a = Konstanta

1, 2, 3, 4 = Koefisien regresi

e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 24,342 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern*) adalah nol maka Kualitas laporan keuangan akan terjadi sebesar 24,342.
- 2) Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X_1) sebesar 1,253 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel partisipasi masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 1,253.
- 3) Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 0,385 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akuntabilitas akan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan sebesar 0,385.
- 4) Koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik (X_3) sebesar 0,883 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel transparansi kebijakan publik akan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan sebesar 0,883.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H_1)

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat kualitas laporan keuangan memiliki t hitung sebesar $2,610 >$ sementara t tabel dengan $\text{sig.} = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $70-3=67$ t tabel 1,667 dengan tingkat signifikansi 0,011 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti partisipasi

masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
(H₂)

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat kualitas laporan keuangan memiliki t hitung sebesar $2,599 > t \text{ tabel } 1,667$ dengan tingkat signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H₃)

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa variabel bahwa tingkat kualitas laporan keuangan memiliki t hitung sebesar $2,301 > t \text{ tabel } 1,667$ dengan tingkat signifikansi 0,025 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan transparansi Kebijakan Publik dalam organisasi maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak terhadap Hipotesis Penelitian H₄, H₅ dan H₆

Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X₁, X₂, dan X₃ berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi (skor rendah) untuk variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik dengan skor rendah sistem pengendalian *intern* (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berasosiasi dengan skor tinggi dari sistem pengendalian *intern* (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M + \beta_5 |X_1 - M| + \beta_6 |X_2 - M| + \beta_7 |X_3 - M| + e \dots \dots \dots (2)$$

Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2013).

Tabel 4.24
Kriteria Penentuan Variabel Moderating

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure</i> Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan
2.	<i>Quasi</i> Moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3.	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4.	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan

Keterangan:

b₂: Variabel sistem pengendalian *intern*

b₃: Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik) dengan variabel sistem pengendalian *intern*

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel sistem pengendalian *intern* atas pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka langkah yang dilakukan adalah meregresikan sebanyak 2 kali untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut :

1) Regresi Tanpa Interaksi

1. Regresi variabel partisipasi masyarakat dan variabel sistem pengendalian *intern* diduga sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Hasil Uji t (Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian *Intern*)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,372	12,991		1,029	,307
Partisipasi Masyarakat	1,456	,519	,406	2,803	,007
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	,166	,080	,301	2,079	,041

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 (2017)

2. Regresi variabel akuntabilitas dan variabel sistem pengendalian *intern*

diduga sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Hasil Uji t (Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian *Intern*)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,762	9,583		2,271	,026
Akuntabilitas	,481	,154	,284	3,119	,003
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	,368	,050	,669	7,335	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 (2017)

3. Regresi variabel transparansi kebijakan publik dan variabel sistem

pengendalian *intern* diduga sebagai variabel moderasi terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Hasil Uji t (Transparansi Kebijakan Publik Dan Sistem Pengendalian *Intern*)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,115	11,175		,995	,323
1 Transparansi Kebijakan Publik	1,374	,383	,330	3,589	,001
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	,288	,051	,523	5,686	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 (2017)

2) Regresi Dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak

Tabel 4.28
Hasil Uji T Hitung - Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	71,414	2,125		33,600	,000
Zscore: Partisipasi Masyarakat	,367	1,099	,039	,334	,740
Zscore: Akuntabilitas	4,486	,870	,478	5,155	,000
Zscore: Transparansi Kebijakan Publik	,354	,728	,038	,486	,629
Zscore: Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	5,860	1,060	,624	5,530	,000
X1_M	1,611	1,626	,080	,991	,326
X2_M	6,960	1,315	,520	5,292	,000
X3_M	2,038	,885	,162	2,304	,025

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_4 , H_5 dan H_6) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi

Pada hasil regresi tanpa interaksi tabel 4.25, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel sistem pengendalian *intern* sebesar 0,041. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan ada pengaruh variabel sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi tabel 4.28, diperoleh nilai signifikansi interaksi partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian *intern* sebesar 0,326 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel sistem pengendalian *intern* termasuk dalam kategori prediktor yang artinya bahwa variabel sistem pengendalian *intern* tidak bisa dijadikan variabel moderating. Variabel sistem pengendalian *intern* dan partisipasi masyarakat memiliki fokus yang berbeda yang tidak dapat dilebur menjadi satu hubungan. Sistem pengendalian *intern* fokus kepada pengendalian yang terjadi di dalam organisasi, sedangkan partisipasi masyarakat fokus kepada pengaruh eksternal.

Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.28 menunjukkan bahwa variabel moderating $X1_M$ mempunyai t hitung sebesar $0,991 < t \text{ tabel } 1,996$ dengan tingkat signifikansi 0,326 yang lebih besar dari 0,05. maka H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian *intern* bukan variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel

partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi hipotesis keempat (H_4) yang mengatakan sistem pengendalian *intern* memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti atau ditolak.

(b) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderating

Pada hasil regresi tanpa interaksi tabel 4.26, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel sistem pengendalian *intern* sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan ada pengaruh variabel sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi tabel 4.28, diperoleh nilai signifikansi interaksi partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian *intern* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 signifikan, maka penggunaan variabel sistem pengendalian *intern* termasuk dalam kategori *Quasi Moderasi* yang artinya bahwa variabel sistem pengendalian *intern* tidak termasuk variabel independen tetapi termasuk variabel moderasi.

Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.28 menunjukkan bahwa variabel moderating $X2_M$ mempunyai t hitung sebesar 5,292 > t tabel 1,996 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian *intern* adalah variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi hipotesis keempat (H_5) yang

mengatakan sistem pengendalian *intern* memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti atau diterima.

(c) Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderating

Pada hasil regresi tanpa interaksi tabel 4.27, diperoleh nilai signifikansi uji t variabel sistem pengendalian *intern* sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan ada pengaruh variabel sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi tabel 4.28, diperoleh nilai signifikansi interaksi transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 signifikan, maka penggunaan variabel sistem pengendalian *intern* termasuk dalam kategori *Quasi Moderasi* yang artinya bahwa variabel sistem pengendalian *intern* tidak termasuk variabel independen tetapi termasuk variabel moderasi.

Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.28 menunjukkan bahwa variabel moderating $X3_M$ mempunyai t hitung sebesar 2,304 > t tabel 1,996 dengan tingkat signifikansi 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian *intern* adalah variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi hipotesis keempat (H_6) yang mengatakan sistem pengendalian *intern* memoderasi pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti atau diterima.

Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Hasil uji koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,865 ^a	,748	,720	4,96895

a. Predictors: (Constant), X3_M, X1_M, Zscore: Sistem Pengendalian Internal, Zscore: Transparansi Kebijakan Publik, X2_M, Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Partisipasi Masyarakat
Sumber: Output SPSS 21

Berdasarkan tabel 4.24 diatas nilai R adalah 0,865 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80 - 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa Zsistem Pengendalian Internal, X3_M, ZTransparansi Kebijakan Publik, X2_M, ZAkuntabilitas, X1_M, ZPartisipasi Masyarakat berpengaruh sangat kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) sebesar 0,720 yang berarti variabilitas kualitas laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel ZSistem Pengendalian Internal, X3_M, ZTransparansi Kebijakan Publik, X2_M, ZAkuntabilitas, X1_M, ZPartisipasi Masyarakat sekitar 72%. Sisanya sebesar 28% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.30
Hasil Uji F – Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4554,676	7	650,668	26,353	,000 ^b
	Residual	1530,810	62	24,690		
	Total	6085,486	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), X3_M, X1_M, Zscore: Sistem Pengendalian Internal, Zscore: Transparansi Kebijakan Publik, X2_M, Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Partisipasi Masyarakat

Sumber: Output SPSS 21

Hasil Anova atau F test pada table 4.25 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 26,353 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel independen ZSistem Pengendalian Internal, X3_M, ZTransparansi Kebijakan Publik, X2_M, ZAkuntabilitas, X1_M, ZPartisipasi Masyarakat secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

E. Pembahasan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh variabel bebas (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan) dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel moderasi, dapat dibuat pembahsan sebagai berikut:

Tabel 4.31

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H ₁	Partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima
H ₂	Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima
H ₃	Transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima
H ₄	Sistem pengendalian <i>intern</i> memoderasi pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Ditolak
H ₅	Sistem pengendalian <i>intern</i> memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima
H ₆	Sistem pengendalian <i>intern</i> memoderasi pengaruh Transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima
H ₇	Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian <i>intern</i> berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hipotesis Diterima

Sumber: data primer yang diolah, (2017)

1. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan karena adanya aspirasi masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan rakyat sebagai *prinsipal* dan kepala daerah sebagai *agent* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku *agent* terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku *prinsipal* adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang selalu memerlukan pertanggungjawaban atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintah juga

memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik juga memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor publik yang berasal dari rakyat. Hidayat (2015), kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerah yang kita tempati. Di samping itu juga sebagai warga negara yang aktif kita harus selalu tanggap dengan segala kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan agar, 1. kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. pemerintah di daerah sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. 3. pemerintah di daerah selalu berpihak kepada kepentingan umum (rakyat) bukan kepentingan partai ataupun kepentingan pribadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aswadi (2014) bahwa akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Rachmawaty (2014) akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja Pemerintah kabupaten Pinrang. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah, Mardiasmo (2006) dalam Zeyn (2011).

Akuntabilitas merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara definitif kualitas pemerintahan yang baik (*Good governance*) ditentukan oleh hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Akuntabilitas keuangan daerah akan memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Pinrang kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), dapat dipenuhi. Oleh karena itu, transparansi atas aktivitas pengelolaan keuangan daerah dirasakan menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi agar masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah kabupaten Pinrang sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan *good governance*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini

sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

3. Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip *good governance*, sehingga semakin transparan laporan keuangan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis diterima.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak

publik. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/*agent* mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011).

Transparansi kebijakan publik memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat (*public*) dengan mengakses laporan keuangan ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Pada penelitian ini

menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sukhemi (2011), bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik.

4. Sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian *intern* tidak bisa dijadikan variabel moderating. Variabel sistem pengendalian *intern* dan partisipasi masyarakat memiliki fokus yang berbeda yang tidak dapat dilebur menjadi satu hubungan. Sistem pengendalian *intern* fokus kepada pengendalian yang terjadi di dalam organisasi, sedangkan partisipasi masyarakat fokus kepada pengaruh eksternal. Karena perbedaan fokus tersebut, maka kedua variabel tidak tepat untuk berinteraksi. Jainuri dan Salahudin (2013), menyatakan bahwa monitoring terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terealisasi dengan terbentuknya

keberanian dari masyarakat. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat dan sistem pengendalian *intern* adalah dua sisi yang berbeda, walaupun dengan pencapaian hasil yang sama.

Partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi Menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Namun kenyataannya yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat pengambilan suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh organisasi pemerintah itu sendiri. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. dikarenakan dinamika sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh sistem pengendalian *intern* dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik/masyarakat, sehingga tidak ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian *intern* dengan partisipasi masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis ditolak.

5. Sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian *intern* dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian *intern* maka akuntabilitas akan terlaksana dengan baik. Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis

yang dilakukan Kurniasih (2014) pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem pengendalian internal pemerintahan telah menjalankan unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dengan baik sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang handal, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan baik artinya sistem pengendalian internal pemerintahan dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan rakyat.

Rasulullah saw. Bersabda:

وَهُوَ يَبْنِيهِ اَعْرَ

Artinya:

“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Pemerintah kabupaten Pinrang sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan *good governance*, sehingga ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian *intern* dengan akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis diterima.

6. Sistem pengendalian *intern* dapat memoderasi Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian *intern* dapat memperkuat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian *intern* maka transparansi kebijakan publik akan terlaksana dengan baik, selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik

atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat (*public*) dengan mengakses laporan keuangan ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/*agent* mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sukhemi (2011), bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik.

Transparansi kebijakan publik dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau. Pemerintah dikatakan transparansi jika pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya dan pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya, sehingga ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian *intern* dengan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis diterima.

7. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian *intern* sebesar 46,2%. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan karena adanya aspirasi masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip *good governance*, sehingga semakin transparan laporan keuangan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan rakyat sebagai

prinsipal dan kepala daerah sebagai *agent* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku *agent* terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku *prinsipal* adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah kabupaten Pinrang sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi untuk

menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan *good governance*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/*agent* mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sukhemi (2011), bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik.

Haryanto dkk (2007) dalam Faristina (2011) mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sistem pengendalian *intern* merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pengertian sistem pengendalian *intern* adalah proses yang integral dari

tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (Mahmudi , 2010:20).

Sistem pengendalian *intern* merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan Sistem Pengendalian *Intern* yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, Transparansi kebijakan publik, dan sistem Pengendalian *Intern* secara simultan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, sehingga hipotesis diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 3 variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan adanya interaksi variabel moderasi yaitu sistem pengendalian *intern*. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian *intern* dan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* dan partisipasi masyarakat

tidak berperan penting terhadap peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

5. Sistem pengendalian *intern* dapat menguatkan pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* telah menjalankan unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dengan baik sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang handal, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen dengan baik artinya sistem pengendalian internal pemerintahan dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sistem pengendalian *intern* dapat menguatkan pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Interaksi sistem pengendalian *intern* dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan.
7. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik, dan sistem pengendalian *intern* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi

kebijakan publik, dan sistem pengendalian *intern* secara simultan mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan mampu mengembangkan variabel bebas.

B. Keterbatasan Masalah

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten Pinrang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan banyak waktu.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah yang lain.
3. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung)". Bandung. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rineka Cita. 2010.
- Awadi, Sri Ayu Wulandari. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" Makassar. 2014.
- Aziz, Harry Azhar. "Hasil laporan keuangan pemerintah daerah" Makassar. 2015.
- Badan, Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012. Jakarta. 2013.
- Daniel, Kartika dan Yohanes Suhardjo. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)". Jurnal STIE Semarang, Volume 5 nomor 3. 2013.
- Drama, Harken. "pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel *intervening*". Kota solok. Padang. 2014.
- Fikri, M. Ali, Biana Adha Inapty, Dan Rr. Sri Pancawati Martiningsi. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel *Moderating*". Mataram NTB. 2015.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS". Semarang : Badan Penerbit Undip. 2013.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. "Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta : Salemba Empat. 2013.
- Hidayat, Rahmad. "Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintah Daerah". Sleman, Yogyakarta. 2015.
- Indriantoro dan Supomo. "Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen". Yogyakarta: BPFE. 2012.

- Jainuri dan Salahudin. "Model Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Malang" Malang. 2013.
- Jensen and Meckling. "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*". *Journal of Financial Economics*). 1976.
- Kartika, Indriya. "Pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan" provinsi jawa barat. 2013.
- Kurniasih, Nurul Apriyanti. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Bandun. 2014.
- Kurniawan, Arief. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD. Kota Surakarta Jawa Tengah. 2012.
- Kusuma, Marhaendra. "pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah cahaya aktiva". Vol.02 no.02, september. kediri. 2012.
- Madjham, Anggraeni S., Sahmin Noholo, Dan Lukman Pakaya. "Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara". Kota Gorontalo. 2013.
- Mahmudi. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIE YPKN", Cetakan pertama, Yogyakarta. 2010.
- Monica, Rarang. "*Relevansi* Laporan Anggaran Pemerintah Daerah". Surakarta. Jawa Tengah. 2011.
- Munawir, Rokhmad. "Transparansi anggaran di kabupaten Surakarta" Jawa Tengah. 2011.
- Mursyidi. "Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia". PT Revika Aditama. Bandung. 2010.
- Mustafa, Ruli. "Transparansi syarat mutlak kebijakan publik". <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/10/31/transparansi-syarat-mutlak-kebijakan-publik-408322.html> diakses pada tanggal 10 februari 2013.
- Mustofa, Anies dan Iqbal. "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang". 2012.

- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. “Standar Akuntansi Pemerintah”. Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Yogyakarta, Edisi Pertama. 2012.
- Nurcholis, Hanif. “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jakarta: Erlangga. Hal 42. 2011.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah”.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia.
- Permana. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas”. Bandung. 2012.
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. “*Determinasi* Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)”. Universitas Muhammadiyah Magelang. SNA XII. 2010.
- Rahayu, Sri. “Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah”. 2010.
- Rachmawaty, Dinie. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Provinsi Jawa timur. 2014.
- Rahmawati, Arini Ayu. “Pengaruh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Sukoharjo”. Surakarta. 2013.
- Riana, Romilia. “Faktor–faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP di Kabupaten Bangkalan”. Bangkalan: Universitas Sumatera Utara. 2011.
- Riduwan. “Dasar-dasar Statistik”. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Rosalin, Faristina. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keandalan dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan badan layanan umum”. Semarang. 2011.

- Sofi, Kohen. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Binta" Tanjungpinang. 2015.
- Sukmaningrum, Tantriani. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Semarang. 2012.
- Sugiyono. "Metode penelitian Bisnis". Alfabeta: Bandung. 2011.
- Sukhemi. "Pengaruh Penyajian Nerca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah". Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 5, April:85-100. 2010.
- Sukhemi. "Pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah". 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (*transparancy*)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Untary, Nurendah Ragillita. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian *Intern* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi" Semarang. 2015.
- Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik". Jurnal WRA, Vol.1, No.1. 2013.
- Yahya dan Idhar. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah". Medan. Universitas Sumatra Utara. Jurnal. Volume 7. 2011.
- Zyen, Elvira. "Pengaruh *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Bandung. 2011.
- <http://www.merdeka.com>
- <http://www.somberenews.com/ditahun-ke-empat-penerima-wtp-pinrang-jadi-pusat-pilot-project>.

L

A

M

P

I

R

A

N

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PINRANG**



Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. email <http://www.dprd-pinrangkab.go.id/>







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 3654/EB.I/PP.00.9/2016
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 22 Oktober 2016

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Prov. Sulawesi Selatan**

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:


Nama : **Hamsinar**
NIM : 10800112063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX(Sembilan)
Alamat : Jln. Poros Malimpung

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai Variabel Moderasi**" (Studi Kasus Kabupaten Pinrang).

Dengan dosen pembimbing : 1. **Jamaluddin, SE, M.Si.**
2. **Puspita Hasdianti A, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Pinrang.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 13792/S.01P/P2T/10/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Pinrang
Cq. Kepala BAPPEDA Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 3654/EB.I/PP.00.9/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **HAMSINAR**
Nomor Pokok : 10800112063
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SEBAGAI VARIABEL MODERASI" (STUDI KASUS KABUPATEN PINRANG).

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 30 November 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 Oktober 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
SIMAP BKPD 26-10-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

□I. Bintang No. 01 Telp. (0421) 921066 Pinrang 91212

Pinrang, 4 Nopember 2016

Nomor : 070.51/263/Litbang.Bappeda
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kab.Pinrang
di,
Pinrang

Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Terpadu Nomor : 13792/S.01.P/P2T/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis dengan judul “ PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

(STUDI KASUS KABUPATEN PINRANG).

Adapun Mahasiswa/peneliti sebagai berikut:

Nama : HAMSINAR
No. Stambuk : 10800112063
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Jl.Muh.Yasin Limpo No.36 Samata,Sungguminasa Gowa
Waktu/Penelitian : 01 November 2016 S/d 30 November 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kiranya dapat diberi bantuan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian atau pengambilan data sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan (sesuai jadwal).
2. Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Pengembangan dan IPTEK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014,tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat dan potensi inovasi unggulan daerah.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hard copy dan soft copy hasil penelitian kepada Bupati Pinrang.Cq. Kepala Bappeda (Bidang penelitian, pengembangan dan statistik) Kab. Pinrang dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar.
5. Surat izin ini ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Bappeda
Kabid Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Ar.Akks Araf
Pangkat Pembina Tk.I
NIP.19581229 197912 1 006

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan) di Pinrang;
2. Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Gatot Subroto No 1 Tlp. (0421) 921 004 Fax.922 157
PINRANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175 / 002 / SET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. SAKKA MAJENG,S.Sos.,MM
N I P : 19621009 198703 1 012
Pangkat /Gol : Pembina Tk.I
Jabatan : Kepala bagian Umum
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kab. Pinrang

Menerangkan bahwa :

N a m a : HAMSINAR
Nim : 10800112063
Jenis Kelamin : Perempuan
Perkerjaan / Prog. Study : Mahasiswi (S1)Universitas Islam Neg. Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa

Benar-benar telah melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kab. Pinrang untuk penyusunan Skripsi dengan Judul **"PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SEBAGAI VARIABEL MODERASI" (STUDI KASUS KABUPATEN PINRANG).**
yang dimulai 01 November s/d 30 November 2016

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 6 Januari 2017

An. Sekretaris
Kepala Bagian Umum,

H. SAKKA MAJENG, S.Sos.,MM
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP: 19621009 198703 1 012



LAMPIRAN KUESIONER

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

Nama Responden :

Jabatan :

Umur : Tahun

Lama Bekerja : Bln/Thn

(Berikan tanda ceklist () pada kotak yang tersedia)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pend. Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pengalaman Kerja : ☐ >1 Tahun
☐ 1-3 Tahun
☐ >3 Tahun
☐ >5 Tahun

B. CARA PENGISIAN

Di bawah ini adalah pernyataan - pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang). Bapak/ Ibu/ Saudara/i dimohon kesediaanya untuk memberikan jawaban atas pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda ceklist() diantara pilihan jawaban yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu-ragu/Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
	Relevan					
1	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.					
2	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
3	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (feedback value)					
4	Informasi dalam Laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (predictive value)					
5	Laporan Keuangan tidak disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
	Keterandalan/Andal					
1	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan					

	peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
2	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
3	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan, tidak teruji kebenarannya					
4	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah					
5	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan harus menjadi acuan dalam praktik penyusunan laporan keuangan					
6	Maraknya pemberitaan tentang laporan keuangan pemerintah daerah di media massa mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan					
7	Tuntutan dunia bisnis atas laporan keuangan pemerintah yang berkualitas semakin meningkat					
8	Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan					
	Dapat Dibandingkan					
1	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

2	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan					
3	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.					
Dapat Dipahami						
1	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna					
2	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna					
3	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tidak dapat dipahami oleh pengguna.					
4	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti					
5	Laporan keuangan yang disajikan/disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD.					

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (XI)

Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan					
2	Opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik penyusunan laporan keuangan					
3	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
4	Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi Informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran					
5	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD					
6	Menurut saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
7	Masyarakat selama ini tidak berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran					
8	Dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan rancangan APBD					
9	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat					
10	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi					

3. Variabel Akuntabilitas (X2)

Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Rencana strategi daerah dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD					
2	Pengelolaan APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.					
3	APBD merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.					
4	Proses dan pertanggung jawaban APBD diawasi secara terus menerus.					
5	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)					
6	Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam nota perhitungan APBD					
7	Jaminan pengelolaan APBD merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan APBD					
8	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
9	Pengawasan APBD tidak perlu dilakukan secara kontinue					
10	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan					

	atau program selesai dilaksanakan.					
11	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
12	Saya merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyarakat					
13	Menurut saya masyarakat mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah diamanahkan kepada anggota dewan					

4. Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X3)

Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
3	Selama ini saya merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran					
4	Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran					
5	Laporan pertanggungjawaban tahunan					

	sepengetahuan saya selama ini tepat waktu					
6	Sulit bagi saya untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, karena terlalu birokratis					
7	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
8	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD					

5. Variabel Sistem Pengendalian Intern (M)

Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

NO	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
	Lingkungan Pengendalian					
1	SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
2	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah					
3	Pimpinan SKPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku					
4	Pimpinan SKPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					

5	Pimpinan Instansi/lembaga di tempat saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik.					
Penilaian Resiko						
1	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko					
2	Pimpinan tidak melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
3	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
4	Risiko pelaksanaan program dan kegiatan diidentifikasi di tiap tingkatan					
5	Risiko yang ditimbulkan atas program dan kegiatan memiliki pengaruh dan menuntut perhatian pimpinan					
6	Pimpinan mengantisipasi timbulnya risiko akibat perubahan ekonomi, peraturan , kegiatan atau kondisi lainnya dapat mempengaruhi pencapaian sasaran					
Kegiatan Pengendalian						
1	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
2	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai.					
3	Semua transaksi yang dientri dan diproses					

	kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi					
4	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset tidak ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik					
5	Pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak.					
6	Pimpinan instansi terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan					
7	Pencatatan dilaksanakan di seluruh siklus transaksi mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi dalam pencatatan ikhtisar					
8	Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya					
Informasi dan Komunikasi						
1	Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab.					
2	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
3	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
4	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif					

	dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan					
5	Tugas dibebankan pada pegawai dikomunikasikan dengan jelas dan dimengerti pengendalian internnya					
Pemantauan						
1	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern					
2	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/ revidi dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat					
3	Pemantauan oleh SKPD mencakup identifikasi kegiatan dan sistem pendukung pencapaian misi					
4	Pimpinan merevidi dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					
5	Pimpinan menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dengan tepat					

Terima kasih kasih saya sampaikan atas kesediaan dan keiklasan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner ini, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin...

TABULASI PERNYATAAN KUSIONER

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

N O	Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah																						T
	Relevan					Keterandalan/Andal								Dapat Dibandingkan				Dapat Dipahami					
	KLK PD1	KLK PD2	KL KP D3	KLK PD4	KLK PD5	KLK PD6	KLK PD7	KLK PD8	KLK PD9	KLKP D10	KLKP D11	KLKP D12	KLKP D13	KLKP D14	KLKP D15	KLKP D16	KLKP D17	KLKP D18	KLKP D19	KLKP D20	KLKP D21	KL KP D22	
1	4	5	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	71
2	5	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	81
3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4	89
4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	3	5	5	93
5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	2	2	1	4	4	4	4	4	83
6	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	88
7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	2	2	4	4	4	4	4	4	87
8	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	3	2	2	3	4	4	4	4	4	86
9	5	4	4	5	2	5	3	4	5	3	3	5	5	4	3	5	5	4	3	3	3	5	88
10	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	4	5	3	3	2	3	2	3	3	4	69
11	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	2	5	4	5	4	5	95
12	5	4	5	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	94
13	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	2	2	5	4	4	4	4	4	89
14	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	3	3	4	67
15	5	4	4	5	2	5	4	4	5	3	3	4	5	3	3	5	5	4	3	3	3	5	87
16	4	3	3	2	2	4	4	2	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	3	3	4	65
17	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	2	5	4	4	5	5	94
18	4	3	3	3	3	4	5	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	69
19	5	4	4	5	5	4	5	5	3	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	94
20	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	94

21	5	4	4	5	5	4	4	3	3	5	4	3	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	84
22	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	69
23	4	3	3	2	2	2	2	4	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	65
24	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	4	4	5	3	3	2	3	3	3	5	4	73
25	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	2	1	4	4	4	4	4	84
26	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	3	4	4	4	2	2	5	4	4	4	4	4	87
27	4	3	3	2	2	4	4	5	3	3	2	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	70
28	4	3	3	2	2	4	4	5	2	3	2	4	4	3	3	3	2	3	2	3	3	4	68
29	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	3	3	3	5	97
30	5	4	4	5	2	5	3	4	5	3	3	5	5	4	2	3	4	4	4	4	4	5	87
31	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	2	5	4	2	5	5	94
32	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	95
33	5	4	4	5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	95
34	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	4	4	5	3	3	2	3	3	4	5	4	74
35	5	4	4	5	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	1	5	5	4	4	4	4	4	85
36	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	68
37	5	4	4	5	2	5	4	4	5	3	3	5	5	4	4	4	4	4	3	3	5	5	90
38	5	4	4	5	2	5	5	5	5	3	3	5	5	3	5	5	5	4	3	3	3	5	92
39	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	67
40	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	67
41	4	4	3	3	2	4	4	2	4	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	77
42	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	82
43	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4	5	3	3	2	3	4	3	5	4	72
44	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	87
45	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	4	4	86
46	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	4	91
47	4	4	3	2	2	4	4	2	3	3	2	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	72

48	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	88
49	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	4	4	2	4	4	79
50	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	92
51	4	5	3	3	2	4	3	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	3	2	4	4	80
52	5	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	80
53	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	2	4	4	87
54	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	5	4	3	5	5	95
55	5	4	4	4	5	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	89
56	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	88
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	83
58	5	4	4	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	92
59	5	4	4	5	2	5	5	4	5	3	3	5	5	3	4	5	5	4	3	3	3	5	90
60	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3	4	66
61	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	2	5	4	2	4	5	92
62	5	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	84
63	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	86
64	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	95
65	5	4	4	5	5	4	4	3	3	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	85
66	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	5	4	89
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	84
68	5	4	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	88
69	5	4	4	5	2	5	5	4	5	3	3	5	5	3	3	5	5	4	3	3	3	5	89
70	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	82

2. Partisipasi Masyarakat

No	Partisipasi Masyarakat										T
	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	
1	3	4	2	4	3	4	2	3	3	3	31
2	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	36
3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	36
5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
6	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	37
7	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
8	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
9	4	4	4	3	3	4	2	3	3	3	33
10	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	32
11	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
14	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	34
15	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	35
16	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	32
17	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
18	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	34
19	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
20	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38
21	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38

22	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	34
23	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	34
24	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	32
25	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
26	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38
27	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	31
28	3	3	2	4	3	3	4	4	3	3	32
29	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
30	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	35
31	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
32	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	38
33	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
34	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	33
35	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35
36	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	32
37	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	33
38	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	35
39	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	32
40	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	34
41	2	2	4	4	2	4	3	4	2	4	31
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	3	3	2	4	3	3	4	4	4	3	33
44	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
45	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
46	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
47	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34
48	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	38

49	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31
50	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	38
51	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
52	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	36
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38
54	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	36
55	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
56	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	37
57	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
58	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
59	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	33
60	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	32
61	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
62	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	36
63	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38
64	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	36
65	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
66	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	37
67	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
68	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38
69	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	33
70	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	40

3. Akuntabilitas

No	Akuntabilitas	T
----	---------------	---

	Ak1	Ak2	Ak3	Ak4	Ak5	Ak6	Ak7	Ak8	Ak9	Ak10	Ak11	Ak12	Ak13	
1	4	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	44
2	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	47
3	4	4	4	5	4	3	5	5	3	4	5	4	4	54
4	5	5	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	53
5	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	38
6	4	4	5	4	4	3	5	5	3	4	4	5	4	54
7	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	38
8	4	4	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	38
9	4	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	5	48
10	4	3	4	3	4	3	2	4	4	3	4	3	3	44
11	4	4	4	4	4	3	3	5	5	4	5	5	4	54
12	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	38
13	3	3	3	4	3	3	2	2	4	4	3	2	4	40
14	4	4	4	4	2	3	2	4	4	3	3	3	3	43
15	5	4	2	5	4	5	2	4	4	3	3	4	3	48
16	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	43
17	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	54
18	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	2	3	3	43
19	2	2	3	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	41
20	2	2	4	4	3	4	2	3	3	2	3	3	3	38
21	4	2	3	4	3	3	3	2	4	3	3	3	3	40
22	5	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	47
23	5	4	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	2	43
24	4	4	3	4	2	3	2	3	4	4	3	5	3	44
25	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	38
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38

27	3	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	3	3	42
28	4	4	3	4	3	4	2	4	4	3	3	3	3	44
29	5	4	4	2	4	5	2	4	4	4	4	4	4	50
30	5	4	3	5	4	2	2	4	4	4	4	4	3	48
31	5	5	2	5	4	5	3	5	4	4	4	4	4	54
32	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
33	2	4	4	3	3	2	2	2	3	4	3	4	3	39
34	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	44
35	5	4	3	5	4	4	2	4	2	4	4	4	3	48
36	3	4	3	3	4	3	2	4	2	3	5	5	3	44
37	5	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	48
38	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	48
39	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	4	44
40	3	4	3	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	44
41	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	48
42	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	4	45
43	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	3	45
44	3	2	4	4	3	3	2	2	1	3	3	4	4	38
45	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	38
46	2	2	4	4	3	3	2	2	2	4	5	5	4	42
47	3	4	4	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	43
48	2	2	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	4	39
49	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	47
50	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	39
51	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	44
52	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	47
53	5	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	4	5	54

54	5	5	2	3	4	4	5	4	2	4	5	5	5	53
55	3	3	2	4	3	3	2	2	3	4	3	3	3	38
56	4	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	4	4	54
57	2	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	4	4	38
58	3	3	2	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	38
59	5	4	4	5	4	2	2	4	3	4	4	4	3	48
60	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	44
61	2	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	3	4	54
62	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	47
63	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	54
64	5	5	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	53
65	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
66	5	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	5	5	54
67	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	38
68	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	3	4	3	38
69	5	4	3	5	4	2	2	4	4	4	3	4	4	48
70	4	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	45

4. Transparansi kebijakan Publik

No	Transparansi Kebijakan Publik								T
	TKP1	TKP2	TKP3	TKP4	TKP5	TKP6	TKP7	TKP8	
1	3	4	4	3	4	3	3	3	27
2	3	3	3	4	3	3	4	4	27
3	4	5	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	3	3	3	3	28

5	4	4	4	4	3	3	4	4	30
6	4	4	3	4	3	4	3	3	28
7	4	4	4	4	4	4	3	5	32
8	3	3	4	5	4	3	3	4	29
9	4	3	4	4	4	4	3	5	31
10	4	4	3	4	3	4	3	3	28
11	4	4	4	5	4	4	4	4	33
12	3	4	4	4	4	3	4	4	30
13	4	3	3	3	4	4	3	4	28
14	4	4	4	3	3	3	3	3	27
15	5	3	3	3	4	3	3	3	27
16	4	3	4	3	3	3	4	3	27
17	4	4	4	4	4	5	4	4	33
18	3	3	4	4	4	3	4	3	28
19	4	4	4	4	4	5	4	4	33
20	4	4	3	4	4	4	4	4	31
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	3	4	3	4	4	3	3	28
23	4	4	4	4	4	3	4	4	31
24	4	4	3	4	3	4	3	4	29
25	4	4	3	4	3	4	4	4	30
26	4	3	3	4	4	4	3	5	30
27	4	4	3	4	4	4	4	4	31
28	3	3	4	3	4	3	4	3	27
29	4	4	5	4	4	4	5	4	34
30	4	4	4	4	4	4	3	4	31
31	5	4	4	4	5	4	4	4	34

[illegible]

9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	3	3	3	4	3	4	3	4	27
11	5	4	5	4	4	4	4	4	34
2	3	3	4	3	4	4	3	3	27
3	4	4	4	4	4	4	4	5	33
4	4	3	4	4	3	3	4	4	29
5	4	4	4	3	3	4	4	4	30
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	4	4	4	4	3	3	4	30
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	4	5	3	4	4	4	32
42	4	4	3	4	3	4	4	4	30

5. Sistem Pengendalian *Intern*

No	Sistem Pengendalian <i>Intern</i>																												T		
	Lingkungan Pengendalian						Penilaian Resiko						Kegiatan Pengendalian						Informasi Dan Komunikasi						Pemantauan						
	S P I 1	S PI 2	S PI 3	S PI 4	S PI 5	S PI 6	S PI 7	S PI 8	S PI 9	SP II 0	SP II 1	SP II 2	SP II 3	SP II 4	SP II 5	SP II 6	SP II 7	SP II 8	SP II 9	SP I2 0	SP I2 1	SP I2 2	SP I2 3	SP I2 4	SP I2 5	SP I2 6	S PI 27	S PI 28		S PI 29	
1	5	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	5	4	4	4	4	3	2	3	4	4	5	5	4	106	
2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	102	
3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	96	
4	4	4	5	5	4	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129	
5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	

6	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	125	
7	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
8	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	2	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
9	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	3	2	2	2	5	3	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87	
10	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	89
11	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
12	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	123	
13	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
14	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	89
15	3	1	1	4	4	5	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	5	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	90	
16	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	89	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	110	
18	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	89	
19	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	5	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
20	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
21	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	129	
22	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	3	4	4	4	88	
23	4	4	3	3	2	3	1	5	4	4	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	87	
24	5	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	92	
25	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	
26	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	127	
27	4	4	2	2	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3	3	3	4	4	4	89	
28	4	4	3	3	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	2	3	3	4	88	
29	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	3	5	4	2	4	4	2	2	4	4	3	87	
30	3	1	1	4	4	5	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	3	5	4	2	4	4	2	2	4	4	3	90	
31	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
32	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125	

33	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
34	4	4	3	3	5	1	4	5	4	3	3	1	2	2	3	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	89
35	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	5	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87
36	4	4	2	2	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3	3	2	4	5	4	89
37	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	5	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87
38	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	2	5	5	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87
39	4	4	2	2	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	95
40	4	4	3	3	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	4	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	92
41	4	2	4	4	2	3	3	2	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	102
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	114
43	4	4	3	3	5	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	92
44	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
45	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
46	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	125
47	4	5	3	3	2	3	4	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	89
48	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
49	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	107
50	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
51	5	4	4	4	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	5	4	4	4	4	3	2	3	4	4	5	5	4	106
52	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	102
53	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	105
54	4	4	5	5	4	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
55	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	2	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
56	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	125
57	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
58	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
59	3	1	1	4	4	2	4	4	3	2	2	4	4	1	2	2	3	5	4	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87

60	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	89
61	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
62	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	102
63	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
64	4	4	5	5	4	3	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	129
65	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	121
66	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	125
67	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	2	3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
68	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	2	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	125
69	3	2	1	4	4	2	4	3	3	2	2	4	4	1	2	2	3	4	5	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	87
70	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	114

A. UJI KUALITAS DATA

1. UJI VALIDITAS DATA

1) PARTISIPASI MASYARAKAT

Correlations

		PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	Partisipasi Masyarakat
PM1	Pearson Correlation	1	,486**	,252*	,092	,036	,113	,084	,112	,341**	,226	,525**
	Sig. (2-tailed)		,000	,036	,449	,764	,351	,490	,356	,004	,060	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PM2	Pearson Correlation	,486**	1	,393**	-,090	,114	,309**	-,206	-,174	,317**	,196	,478**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,457	,348	,009	,087	,150	,007	,104	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PM3	Pearson Correlation	,252*	,393**	1	-,214	-,017	,288*	-,111	-,045	,176	,307**	,457**
	Sig. (2-tailed)	,036	,001		,075	,892	,015	,360	,708	,145	,010	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PM4	Pearson Correlation	,092	-,090	-,214	1	,079	,120	,237*	,163	,222	,218	,368**
	Sig. (2-tailed)	,449	,457	,075		,517	,321	,049	,178	,064	,069	,002
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PM5	Pearson Correlation	,036	,114	-,017	,079	1	,014	,009	,057	,318**	,032	,341**
	Sig. (2-tailed)	,764	,348	,892	,517		,910	,943	,640	,007	,793	,004
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PM6	Pearson Correlation	,113	,309**	,288*	,120	,014	1	-,020	-,022	,224	,446**	,495**
	Sig. (2-tailed)	,351	,009	,015	,321	,910		,870	,859	,062	,000	,000

PM7	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	-,084	-,206	-,111	,237*	,009	-,020	1	,211	,273*	,222	,332**
	Sig. (2-tailed)	,490	,087	,360	,049	,943	,870		,079	,022	,064	,005
PM8	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,112	-,174	-,045	,163	,057	-,022	,211	1	,248*	,243*	,373**
	Sig. (2-tailed)	,356	,150	,708	,178	,640	,859	,079		,038	,043	,001
PM9	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,341**	,317**	,176	,222	,318**	,224	,273*	,248*	1	,518**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,004	,007	,145	,064	,007	,062	,022	,038		,000	,000
PM10	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,226	,196	,307**	,218	,032	,446**	,222	,243*	,518**	1	,698**
	Sig. (2-tailed)	,060	,104	,010	,069	,793	,000	,064	,043	,000		,000
Partisipasi Masyarakat	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,525**	,478**	,457**	,368**	,341**	,495**	,332**	,373**	,749**	,698**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,004	,000	,005	,001	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2) AKUNTABILITAS

Correlations

	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	AK7	AK8	AK9	AK10	AK11	AK12	AK13	Akuntabilitas
AK1 Pearson Correlation	1	,608**	,039	,180	,498**	,174	,218	,545**	,195	,229	,345**	,269*	,156	,648**

[illegible]

AK9	Pearson Correlation	,195	,219	,085	,235*	,123	-,094	,016	,346**	1	,038	-,008	-,121	,082	,314**
	Sig. (2-tailed)	,106	,068	,486	,050	,312	,437	,898	,003		,755	,948	,318	,500	,008
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
AK10	Pearson Correlation	,229	,283*	,120	,278*	,317**	-,067	,124	,198	,038	1	,442**	,384**	,262*	,466**
	Sig. (2-tailed)	,056	,018	,321	,020	,007	,581	,308	,100	,755		,000	,001	,029	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
AK11	Pearson Correlation	,345**	,361**	,225	,144	,604**	,125	,352**	,505**	-,008	,442**	1	,563**	,474**	,687**
	Sig. (2-tailed)	,003	,002	,061	,234	,000	,301	,003	,000	,948	,000		,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
AK12	Pearson Correlation	,269*	,172	,089	,137	,269*	,006	,153	,255*	-,121	,384**	,563**	1	,328**	,458**
	Sig. (2-tailed)	,025	,154	,464	,258	,024	,959	,207	,033	,318	,001	,000		,006	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
AK13	Pearson Correlation	,156	,206	,206	,064	,486**	,164	,413**	,360**	,082	,262*	,474**	,328**	1	,556**
	Sig. (2-tailed)	,196	,087	,086	,596	,000	,176	,000	,002	,500	,029	,000	,006		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,648**	,725**	,391**	,417**	,756**	,300*	,569**	,858**	,314**	,466**	,687**	,458**	,556**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,012	,000	,000	,008	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3) TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Correlations

		TKP1	TKP2	TKP3	TKP4	TKP5	TKP6	TKP7	TKP8	Transparansi Kebijakan Publik
TKP1	Pearson Correlation	1	,124	,046	,284 [*]	,188	,197	,146	,242 [*]	,541 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,308	,708	,017	,119	,102	,228	,044	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP2	Pearson Correlation	,124	1	,280 [*]	,315 ^{**}	-,070	,230	,094	,178	,527 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,308		,019	,008	,565	,055	,440	,141	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP3	Pearson Correlation	,046	,280 [*]	1	,065	,367 ^{**}	-,113	,228	,054	,453 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,708	,019		,591	,002	,353	,058	,655	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP4	Pearson Correlation	,284 [*]	,315 ^{**}	,065	1	-,033	,254 [*]	,024	,548 ^{**}	,618 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,017	,008	,591		,785	,034	,846	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP5	Pearson Correlation	,188	-,070	,367 ^{**}	-,033	1	,154	,208	,108	,446 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,119	,565	,002	,785		,202	,083	,375	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP6	Pearson Correlation	,197	,230	-,113	,254 [*]	,154	1	,119	,346 ^{**}	,527 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,102	,055	,353	,034	,202		,328	,003	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TKP7	Pearson Correlation	,146	,094	,228	,024	,208	,119	1	-,024	,412 ^{**}

TKP8	Sig. (2-tailed)	,228	,440	,058	,846	,083	,328		,841	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,242*	,178	,054	,548**	,108	,346**	-,024	1	,610**
	Sig. (2-tailed)	,044	,141	,655	,000	,375	,003	,841		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson Correlation	,541**	,527**	,453**	,618**	,446**	,527**	,412**	,610**	1
Kebijakan	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Publik	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4) SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*

Correlations

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SPI27	Pearson Correlation	,409**	,366**	,737**	,691**	,114	,569**	,188	,312**	,407**	,744**	,709**	,657**	,761**	,560**	,321**	,156	,358**	,418**	,388**	,556**	,722**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,346	,000	,119	,009	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,198	,002	,000	,001	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
SPI28	Pearson Correlation	,554**	,365**	,621**	,553**	,245*	,525**	,271*	,396**	,536**	,618**	,610**	,555**	,666**	,416**	,250*	,065	,205	,370**	,431**	,446**	,549**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,041	,000	,023	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,037	,592	,088	,002	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
SPI29	Pearson Correlation	,841**	,838**	,660**	,056	-,022	,419**	,255*	,153	,906**	,584**	,570**	-,039	,057	,479**	,492**	,305*	,152	-	,109	-,210	,210**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,643	,858	,000	,033	,207	,000	,000	,000	,751	,639	,000	,000	,010	,209	,004	,370	,081	,070**
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	,390**	,496**	,911**	,798**	,284*	,711**	,258*	,344**	,495**	,939**	,875**	,737**	,842**	,798**	,571**	,293*	,509**	,415**	,321**	,638**	,830**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,017	,000	,031	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,014	,000	,000	,007	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5) KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

		Correlations																						
		KL K1	KL K2	KL K3	KL K4	KL K5	KL K6	KL K7	KL K8	KL K9	KL K10	KL K11	KL K12	KL K13	KL K14	KL K15	KL K16	KL K17	KL K18	KL K19	KL K20	KL K21	KL K22	Kualit as Lapor an Keuan gan
KLK1	Pearson	1	,58	,54	,78	,48	,34	,23	,24	,33	,448	,631	,541	,332	,137	,171	,394	,437	,640	,400	,421	,277	,317	,781**
	Correlation		0**	8**	2**	6**	5**	2	2*	3**	**	**	**	**			**	**	**	**	**	*	**	
	Sig. (2-tailed)		,00	,00	,00	,00	,00	,05	,04	,00	,000	,000	,000	,005	,259	,157	,001	,000	,000	,001	,000	,020	,007	,000
KLK2	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Pearson	,58	1	,50	,53	,37	,37	,05	,11	,43	,452	,646	,504	,322	,310	,342	,258	,316	,905	,516	,100	,418	,333	,738**
	Correlation	0**		4**	7**	0**	1**	9	3	1**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**		**	**	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KLK2 1	Pearson	,277*	,418**	,322**	,240*	,384**	,233	- ,03	,077	,084	,307**	,453**	,264*	,124	,641**	,225	- ,030	- ,028	,490**	,608**	,080	1	,188	,487**
	Correlation							3																
	Sig. (2-tailed)	,020	,000	,007	,045	,001	,052	,786	,524	,489	,010	,000	,027	,307	,000	,061	,803	,821	,000	,000	,509		,119	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KLK2 2	Pearson	,317**	,333**	,182	,290*	,029	,905**	,282*	,048	,500**	- ,205	,013	,333**	,879**	,125	,261*	,371**	,208	,465**	,018	- ,133	,188	1	,443**
	Correlation																							
	Sig. (2-tailed)	,007	,005	,132	,015	,809	,000	,018	,692	,000	,089	,914	,005	,000	,302	,029	,002	,084	,000	,883	,272	,119		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson	,781**	,738**	,805**	,842**	,630**	,495**	,305*	,323**	,550**	,583**	,813**	,673**	,455**	,360**	,411**	,452**	,533**	,799**	,630**	,300*	,487**	,443**	1
	Correlation																							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,010	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,012	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. UJI RELIABILITAS DATA

PARTISIPASI MASYARAKAT

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,616	,633	10

AKUNTABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,807	,809	13

TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,609	8

SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*

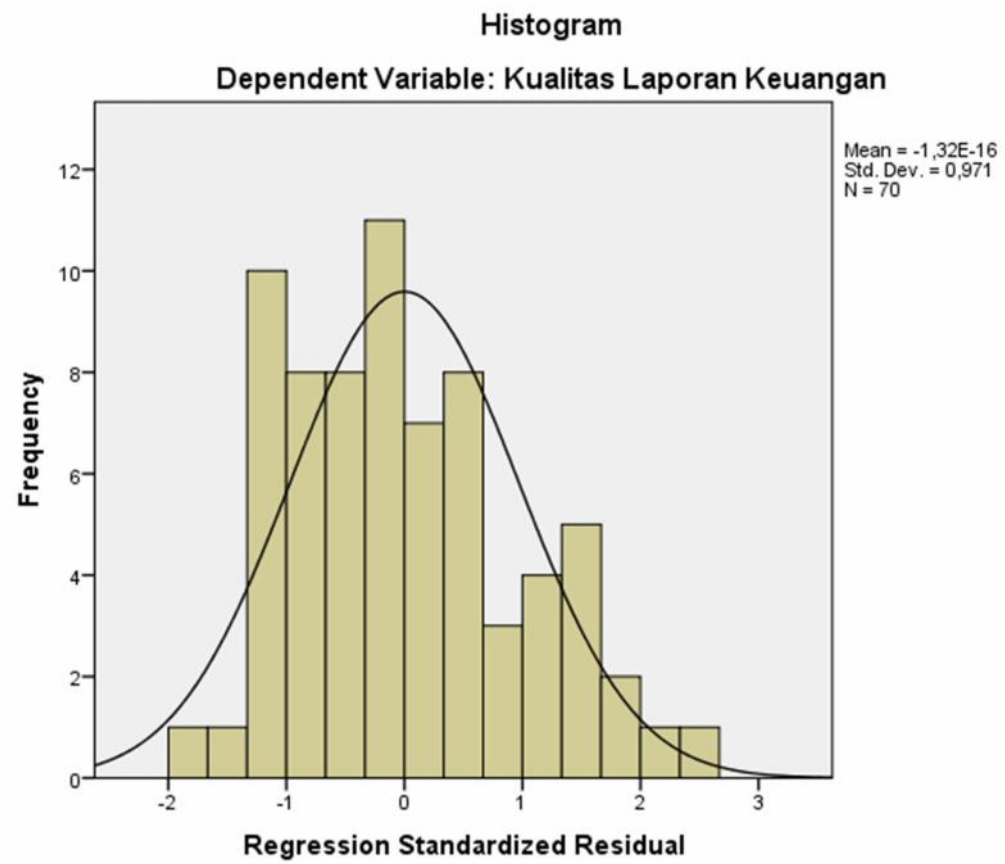
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,948	,950	29

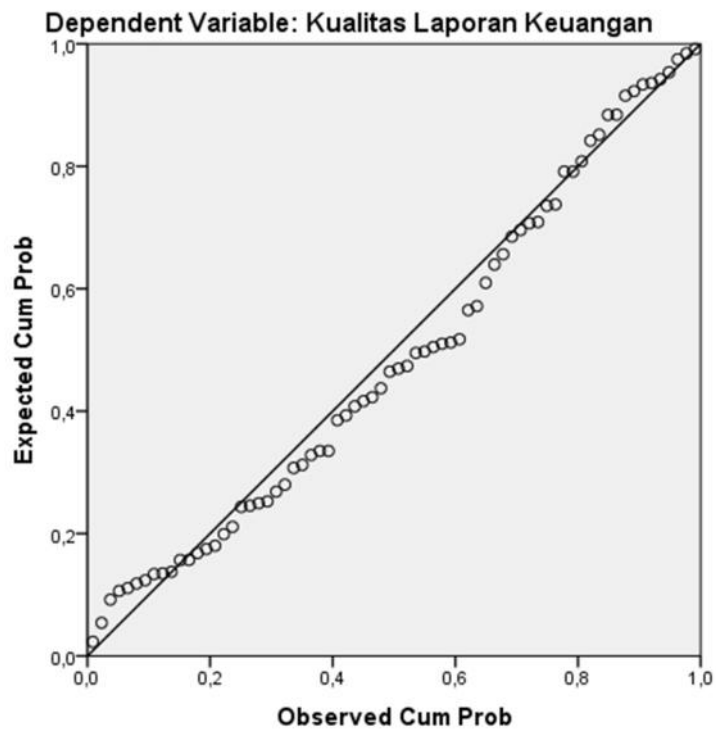
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,887	,900	22

B. ANALISIS DATA



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	24,342	14,760		1,649	,104		
1 Partisipasi Masyarakat	1,253	,480	,350	2,610	,011	,373	2,683
Akuntabilitas	,385	,148	,228	2,599	,012	,871	1,148
Transparansi Kebijakan Publik	,883	,384	,212	2,301	,025	,790	1,266
Sisten Pengendalian Internal	,179	,072	,325	2,470	,016	,388	2,580

a.Laporan Keuangan

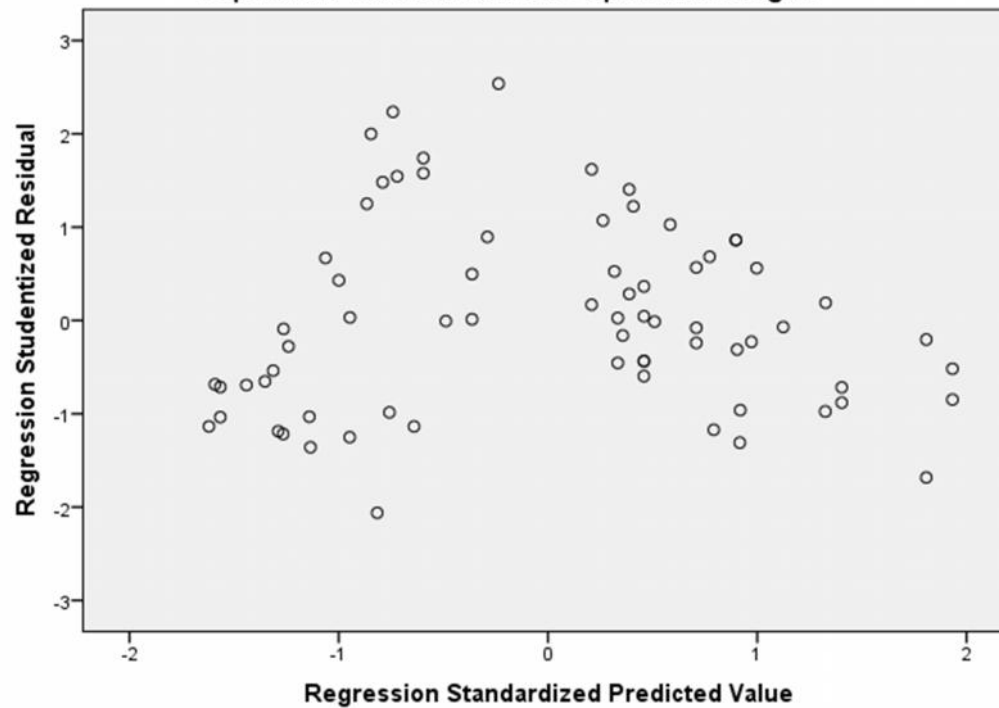
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	Partisipasi Masyarakat	Akuntabilitas	Transparansi Kebijakan Publik	Sisten Pengendalian Internal
1	1	4,965	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,024	14,371	,00	,00	,24	,00	,19
	3	,007	27,513	,08	,02	,71	,12	,32
	4	,003	40,028	,22	,08	,00	,88	,02
	5	,001	62,138	,70	,91	,05	,00	,47

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	72,0476	97,1267	83,4857	7,05780	70
Std. Predicted Value	-1,621	1,933	,000	1,000	70
Standard Error of Predicted Value	1,258	2,469	1,674	,332	70
Adjusted Predicted Value	72,4535	97,7154	83,4782	7,13260	70
Residual	-12,72706	15,18327	,00000	6,19539	70
Std. Residual	-1,994	2,379	,000	,971	70
Stud. Residual	-2,062	2,538	,001	1,007	70
Deleted Residual	-13,60617	17,28923	,00753	6,67781	70
Stud. Deleted Residual	-2,116	2,654	,004	1,021	70
Mahal. Distance	1,694	9,338	3,943	2,011	70
Cook's Distance	,000	,179	,016	,025	70
Centered Leverage Value	,025	,135	,057	,029	70

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,752 ^a	,565	,538	6,38317

a. Predictors: (Constant), Sisten Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	3437,067	4	859,267	21,089	,000 ^b
	Residual	2648,418	65	40,745		
	Total	6085,486	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sisten Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-24,342	14,760		-1,649	,104
Partisipasi Masyarakat	1,253	,480	,350	2,610	,011
1 Akuntabilitas	,385	,148	,228	2,599	,012
Transparansi Kebijakan Publik	,883	,384	,212	2,301	,025
Sisten Pengendalian Internal	,179	,072	,325	2,470	,016

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,865 ^a	,748	,720	4,96895

a. Predictors: (Constant), X3_M, X1_M, Zscore: Sisten Pengendalian Internal, Zscore: Transparansi Kebijakan Publik, X2_M, Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Partisipasi Masyarakat

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4554,676	7	650,668	26,353	,000 ^b
Residual	1530,810	62	24,690		
Total	6085,486	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), X3_M, X1_M, Zscore: Sisten Pengendalian Internal, Zscore: Transparansi Kebijakan Publik, X2_M, Zscore: Akuntabilitas, Zscore: Partisipasi Masyarakat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	71,414	2,125		33,600	,000
Zscore: Partisipasi Masyarakat	,367	1,099	,039	,334	,740
Zscore: Akuntabilitas	4,486	,870	,478	5,155	,000
Zscore: Transparansi Kebijakan Publik	,354	,728	,038	,486	,629
Zscore: Sisten Pengendalian Internal	5,860	1,060	,624	5,530	,000
X1_M	1,611	1,626	,080	,991	,326
X2_M	6,960	1,315	,520	5,292	,000
X3_M	2,038	,885	,162	2,304	,025

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

RIWAYAT HIDUP



Hamsinar, lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 Juli 1993. Sehari-harinya biasa dipanggil Sinar. Putri Bungsu dari 7 bersaudara oleh ayahanda Badduring Salatang dan Ibunda Katang Mengge. Perjalanan pendidikannya diawali sekolah di SD 122 Pinrang, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Mazakhirah dan melanjutkan ke SMKN 4 Pinrang. Pengalaman organisasi diawali pada masa pendidikan sejak Sekolah Dasar. Pada saat SD terlibat dalam organisasi pramuka, pada masa SMP terlibat dalam organisasi Pramuka, dan pada masa SMA terlibat dalam organisasi Pramuka, Karya Tulis Ilmiah (KIR) dan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU). Pendidikan tinggi dimulai ketika lulus Ujian Masuk Mandiri (UMM) tahun 2012, pada saat itu diterima di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mulai pada saat itu kehidupan lebih mandiri baik secara akademis, organisasi dan personal. Di tahun 2016, fokus mengerjakan tugas akhir (SKRIPSI) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi.